

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI PUSKESMAS KEDUNGWUNGU  
KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh :  
Yasinta Salsabela  
NIM : E20193086

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
NOVEMBER 2023**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI PUSKESMAS KEDUNGWUNGU  
KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

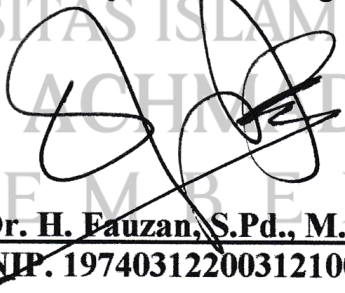
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

**Yasinta Salsabela**  
**NIM: E20193086**

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si**  
**NIP. 197403122003121008**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI PUSKESMAS KEDUNGWUNGU  
KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 November 2023

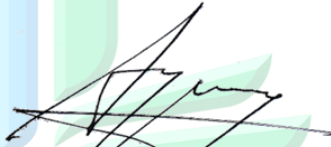
**Tim Penguji**

**Ketua Sidang**



**M. Saiful Anam, S.Ag., M.Ag.**  
NIP: 197111142003121002


**Sekretaris**



**Agung Parmono, SE., M.Si**  
NIP: 197512162009121002

Anggota:

1. Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. (  )

2. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. (  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Ubaidillah, M.Ag.**  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Qs Al-Anfal 8:27)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, Al Anfal 8:27.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah segala puji bagi Allah SWT serta sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dalam terselesainya karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ibu Sriyatiningasih dan Ayah Supriyadi priharianto. Terimakasih yang tiada hentinya untuk beliau yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, nasehat dan doa-doa yang tulus terlontarkan serta kerja keras demi kesuksesan anak-anaknya, terimakasih cinta dan kasih sayang yang telah diberikan serta dukungan dan pengorbanan selama ini sampai penulis bisa di titik ini. Semoga selalu bisa membahagiakan Ibu dan Ayah di dunia dan di akhirat.
2. Terimakasih kepada Kakak Ega yang sudah selalu membantu dan memberikan semangat.
3. Segenap guru dan dosen yang telah memberikan ilmunya semoga kelak menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, Amin.
4. Terimakasih kepada teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu untuk semangat dan dukungannya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puja dan puji syukur atas ke hadirat Allah SWT. karena rahmat, karunia, serta taufiq dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan SKRIPSI ini dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI PUSKESMAS KEDUNGWUNGU KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI”**. Sholawat serta salam saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang memperkenalkan kita dengan pengetahuan. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (UIN Kiai Achmad Siddiq Jember) untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata Satu Dalam Ilmu Ekonomi dan Akuntansi..

Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis menyadari bahwa didapat karena dukungan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni. S. Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Dr. H. Fauzan, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengalurkan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pimpinan dan Staf Kayawan Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan izin untuk penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan yang positif itu semua, diharapkan semoga Allah SWT. membalasnya dengan pahala yang lebih baik dan lebih banyak sebagaimana janji-nya.

Dengan segala kerendahan hati, kami berharap akan koreksinya, atas segala kesalahan dan kehilafan, kami minta maaf sebesar-besarnya, akhirnya kepada Allah lah hamba memuja dan memohon maghfiroh.

Jember, 08 November 2023  
Penulis,

**YASINTA SALSABELA**  
**NIM. E20193086**

## ABSTRAK

**Yasinta Salsabela, Dr. H. Fauzan, M.Si, 2023** : *Analisis Pengelolaan Dana Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.*

**Kata kunci:** Pengelolaan Dana, Mekanisme, Dana Kapitasi

Dalam era yang terus berkembang, pemerintah Indonesia melindungi rakyatnya melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Puskesmas memiliki peran penting dalam penyediaan layanan kesehatan di tingkat primer dan pengelolaan dana BPJS. Laporan keuangan Puskesmas menjadi kunci untuk memantau penggunaan dana BPJS dengan efektif dan efisien serta mengidentifikasi tantangan, termasuk masalah transparansi dan pemahaman tata kelola keuangan yang baik. Manajemen keuangan menjadi fokus utama dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan, menyediakan informasi kunci untuk mengendalikan aktivitas kesehatan masyarakat.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Analisis Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pada menentukan informan peneliti memakai teknik purposive. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Pengelolaan dana kapitasi BPJS di Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi melibatkan beberapa mekanisme yang meliputi perencanaan sumber dana, pengawasan, serta pengendalian. Proses perencanaan atau alokasi dana kapitasi BPJS di Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi masih di sesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Daerah. Dalam konteks transparansi saat ini, Puskesmas Kedungwungu belum menerapkan PPK-BLUD. Hal ini karena penerapan PPK-BLUD dapat memberikan banyak keunggulan yang dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan mereka. Salah satu keunggulannya adalah fleksibilitas dalam mengelola keuangan, di mana Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi dapat mengelola dana mereka sendiri tanpa bergantung pada dukungan operasional dari Pemerintah Daerah (PEMDA).



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	7
1. Pengelolaan Dana .....	8
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	25
1. Puskesmas .....	25
2. Pengelolaan Dana.....	27
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi penelitian .....	37
C. Subjek Penelitian.....	38

D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Analisis Data .....	41
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	43
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	45
B. Penyajian dan Analisis Data.....	54
C. Pembahasan Temuan.....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Simpulan .....	80
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Draft pernyataan Wawancara	
3. Matrik Penelitian	
4. Jurnal Kegiatan Penelitian	
5. Surat Permohonan Ijin Penelitian	
6. Surat Selesai Penelitian	
7. Dokumentasi	
8. Surat selesai bimbingan	
9. Surat plagiasi	
10. Biodata	


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## Daftar Gambar

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Puskesmas Kedungwungu.....	48
Gambar 4.2 Alur Penganggaran Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi.....	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 4.1 Dana Kapitasi pada bulan Januari – Desember Anggaran 2022 .....	56
Tabel 4.2 Per Kode Rekening Belanja Tahun 2022 .....	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam era yang terus berkembang seperti sekarang, setiap individu tidak dapat menghindari risiko, baik itu terkait dengan kekayaan maupun risiko terhadap kesehatan dan kehidupan. Setiap orang pada akhirnya akan mengalami sakit, meskipun tidak dapat diprediksi kapan hal itu akan terjadi. Risiko tersebut bisa berupa penyakit, kecelakaan, cacat, atau bahkan kematian. Akibat dari risiko tersebut, biaya yang signifikan mungkin akan timbul. Untuk meminimalisir masalah tersebut, pemerintah merasa perlu untuk menyusun program dan sistem jaminan sosial. Program tersebut bertujuan untuk melindungi seluruh anggota masyarakat dari tekanan ekonomi atau kehilangan pendapatan akibat pengangguran, kecelakaan, sakit, cacat, masa tua, atau kematian. Semakin baik tingkat program yang diberikan oleh pemerintah, maka akan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan semakin buruk kualitas program yang diberikan, maka semakin rendah kesejahteraan rakyat yang didapat.<sup>2</sup>

Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah berusaha memberikan perlindungan bagi masyarakat guna mencukupi kebutuhan hidup yang layak melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam Undang-

---

<sup>2</sup> Afif Fauziyani Sholiha, Hardi Warsono. "Analisis Kualitas Pelayanan Program Jaminan hari Tua Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) 1 Ketenagakerjaan Cabang Ungaran," *Journal Of Public Policy And Management Review*, 7(4), (2018):180-191.

Undang No. 40 Tahun 2004. Sebagai tanggung jawab dalam melaksanakan jaminan kesehatan masyarakat dan memastikan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia, pemerintah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program tersebut diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sebuah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, bertujuan untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial di Indonesia.

BPJS kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) didefinisikan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah agar menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan merupakan satu-satunya program pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan secara khusus oleh pemerintah, BPJS Kesehatan bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan ditugaskan untuk memberikan proteksi supaya semua lapisan masyarakat memperoleh akses kesehatan secara merata.<sup>3</sup>

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas kesehatan yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara individu maupun kelompok di tingkat pertama. Puskesmas memiliki fokus utama pada upaya preventif serta promotif guna mencapai tingkat kesehatan masyarakat

---

<sup>3</sup> Monica Pertiwi, Herbasuki Nurcahyanto. "Efektivitas program BPJS kesehatan di kota Semarang (studi kasus pada pasien pengguna jasa BPJS kesehatan di puskesmas Srandol)," *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), (2017) :416-430.

yang optimal di wilayahnya. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan di Indonesia, terutama pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas mempunyai peran penting serta menjadi tulang punggung untuk penyediaan layanan kesehatan. Kontribusi Puskesmas yang berhasil memberikan pelayanan kesehatan berdampak besar dalam pembangunan kesehatan. Partisipasi masyarakat memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pembangunan kesehatan. Salah satu aspek penting dari hal ini adalah kontribusi Puskesmas, yang bertujuan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam berbagai program Kesehatan agar terus meningkat.

Puskesmas juga berfungsi sebagai organisasi kesehatan fungsional yang mengembangkan kesehatan masyarakat serta berperan dalam membina partisipasi masyarakat. Selain menerapkan pelayanan yang terpadu dan menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya, Puskesmas juga merupakan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas merupakan sebuah organisasi kesehatan yang berperan sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat.. Menurut jurnal yang ditulis oleh Oktari RS dan Hendra Kurniawan menjelaskan bahwa Puskesmas memiliki tanggung jawab serta wewenang yang sangat besar dalam menjaga kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat seoptimalnya. Puskesmas berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam

penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.<sup>4</sup>

Pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi hal yang penting dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu lembaga pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam pelaksanaan program BPJS di tingkat pelayanan primer. Puskesmas menerima dana dari BPJS untuk membiayai pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS. Dana BPJS merupakan sumber pendanaan yang diterima oleh Puskesmas untuk membiayai pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS. Puskesmas perlu menyusun laporan keuangan yang mencakup penerimaan dan penggunaan dana BPJS sebagai bagian dari tata kelola keuangan yang baik. Dengan demikian, laporan keuangan Puskesmas menjadi instrumen penting dalam mengawasi dan memantau pengelolaan dana BPJS sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Menurut Skripsi yang ditulis oleh Makdalena Siregar menjelaskan bahwa pada dasarnya, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas tersebut. Dalam pencatatan laporan keuangan, intinya adalah mencatat informasi tentang kejadian yang telah terjadi, sementara tidak mencatat transaksi yang akan datang.<sup>5</sup>

Laporan keuangan Puskesmas menjadi alat penting dalam mengawasi

---

<sup>4</sup> Rina Suryani Oktari dan Hendra Kurniawan. "Framework ketahanan puskesmas dalam menghadapi bencana. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*," 16(1), (2016):44-52.

<sup>5</sup> Makdalena Siregar. "*Analisis Pencatatan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Dalam Laporan Keuangan Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang*" (Skripsi, Universitas Tridinanti, 2020).



dan memantau pengelolaan dana BPJS secara efektif dan efisien. Laporan keuangan ini memberikan gambaran tentang penerimaan dan penggunaan dana BPJS serta kinerja keuangan Puskesmas dalam mengelola dana tersebut. Melalui laporan keuangan Puskesmas, dapat teridentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan dana BPJS. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang penggunaan dana BPJS, termasuk pengeluaran, pendapatan, dan arus kas yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Dengan menganalisis laporan keuangan, dapat diidentifikasi masalah seperti kurangnya transparansi, penyalahgunaan dana, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, dan kurangnya pemahaman mengenai tata kelola keuangan yang baik. Oleh karena itu, laporan keuangan Puskesmas berperan dalam mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan dana BPJS dan memberikan dasar untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut skripsi yang ditulis oleh Eni menjelaskan bahwa Manajemen keuangan menjadi prioritas utama yang perlu ditingkatkan oleh seorang akuntan untuk proses penyusunan serta pengelolaan laporan keuangan, dengan tujuan untuk menyediakan data atau informasi yang diperlukan untuk mengendalikan aktivitas perusahaan atau organisasi.<sup>6</sup>

Dalam konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, terdapat fenomena yang ditandai dengan adanya pendapatan anggaran dana dari BPJS yang mencapai tingkat terendah di antara seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Pendapatan anggaran dana yang rendah ini menjadi perhatian

---

<sup>6</sup> Eni. "Pengelolaan Dana BPJS Sesuai Laporan Keuangan Puskesmas Bajo Kabupaten Luwu." (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020).

penting karena berpotensi memberikan dampak negatif pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS di wilayah Puskesmas Kedungwungu. Adanya pendapatan anggaran dana BPJS yang terendah dapat mempengaruhi cakupan, mutu, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta BPJS di wilayah Puskesmas Kedungwungu.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf Puskesmas, yang sudah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan Konteks Penelitian tersebut, dapat ditemukan beberapa permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian bertujuan antara lain:

1. Untuk Mengetahui Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian mencakup yang dihasilkan setelah penelitian selesai. Kegunaan dapat berupa kegunaan praktis atau teoritis. Adapun kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yaitu sebagai berikut :

##### 1. Bagi Instansi

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka penelitian diharapkan bisa bermanfaat untuk memberikan wawasan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai akuntansi syariah khususnya Analisis Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Puskesmas.

##### 2. Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi terutama yang berkaitan dengan penelitian terhadap Analisis Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Puskesmas.

##### 3. Bagi Rekan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan khususnya Analisis Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Puskesmas.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang arti istilah yang dimaksud oleh peneliti, Defini istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi fokus penelitian dalam judul penelitian. Dari judul penelitian penulis " Analisis Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di

Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi”.

## 1. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana merupakan proses mengelola atau mengatur sumber daya keuangan dengan tujuan memanfaatkannya secara efektif dan efisien. Pengelolaan dana bisa dilakukan oleh individu, perusahaan, atau lembaga keuangan, dan mencakup pengelolaan dana internal maupun eksternal yang diperoleh dari lembaga lain. Tujuan utama dari pengelolaan dana adalah memperoleh keuntungan optimal dengan mengurangi risiko kerugian. Selain itu, pengelolaan dana juga melibatkan pengawasan dan pengendalian tenaga serta pemanfaatan sumber daya alam. Pengelolaan dana yang baik sangat penting untuk mencapai keberhasilan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, mengurangi risiko, dan memaksimalkan keuntungan. Pengelolaan merupakan upaya untuk mengubah sesuatu dari kondisi awalnya menjadi lebih baik dan bernilai tinggi.<sup>7</sup>

## 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

BPJS merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Di Indonesia, terdapat dua jenis badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan bertanggung jawab mengadakan program jaminan kesehatan untuk pegawai negeri sipil

---

<sup>7</sup> Pascallino Julian Suawa, dkk. Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *Jurnal Governance*, 1(2), 2021.

(PNS), masyarakat umum, serta karyawan swasta. Program jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN beroperasi dengan sistem asuransi di mana peserta wajib membayar iuran dengan jumlah terjangkau sebagai kontribusi untuk biaya perawatan kesehatan di masa depan. Semua penduduk Indonesia, termasuk warga asing yang telah bekerja selama minimal enam bulan di Indonesia dan membayar iuran, diwajibkan menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS. Menurut jurnal yang ditulis oleh Zaeni menjelaskan bahwa Jaminan sosial merupakan perlindungan yang diberikan oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya perihal peristiwa-peristiwa atau resiko-resiko tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, supaya menghindari berita tersebut yang bisa mengakibatkan hilangnya atau turunya separuh penghasilan, serta untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga serta anak.<sup>8</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan terdiri dari deskripsi alur pembahasan skripsi yang diawali dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Sistematika pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut :

**BAB I**, merupakan sebuah bab pendahuluan. Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah yang dipaparkan secara lengkap karena

---

<sup>8</sup> Zaeni, Asyhadie., *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), 200.

adanya sebuah perhitungan yang belum ditemukan jawabannya. Terdapat pula fokus penelitian dimana fokus penelitian tersebut merupakan aspek penting terhadap perihal apa yang ingin di cari tahu, lalu ada juga tujuan penelitian sebagai landasan untuk melakukan pembahasan, kemudian ada juga manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

**BAB II**, merupakan kajian kepustakaan, dalam bab ini berisikan penelitian terdahulu, dan kajian teori.

**BAB III**, adalah metode penelitian. Dalam bab ini, terdapat informasi mengenai metode dan jenis penelitian yang diadopsi sebagai tahap awal dalam upaya mengumpulkan data dan informasi. Terdapat pula penjelasan tentang lokasi di mana proses tarif jasa terjadi, diikuti dengan diskusi mengenai subjek dan objek penelitian yang memiliki peran penting dalam mengumpulkan data dan informasi. Selain itu, bab ini juga membahas teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan tahapan-tahapan yang akan dijalani dalam penelitian ini.

**BAB IV**, merupakan penyajian data. Bab ini memberikan gambaran tentang objek dari perhitungan yang sedang dilakukan. Selanjutnya, yang paling penting adalah penyajian data, yang didasarkan pada hasil dari pencarian data kepada informan dan diskusi tentang hasil yang diharapkan dari semua data yang dikumpulkan.

**BAB V**, merupakan penutup, Dalam bab ini, terdapat rangkuman dari semua data, informasi, dan argumentasi yang telah disajikan dalam pembahasan. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan lebih rinci

tentang temuan dan kebenaran yang telah ditemukan. Selain itu, bab ini juga berisi rekomendasi membangun yang disarankan untuk perbaikan dalam konteks perhitungan yang sedang dipertimbangkan, dengan harapan agar permasalahan tersebut dapat dipahami dan diperhatikan lebih baik lagi.

**BAB terakhir** memuat tentang daftar pustaka, pernyataan keaslian penulis dan lampiran-lampiran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelaah terhadap penelitian yang telah ada. Peneliti mengemukakan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dengan judul yang akan diteliti sehubungan dengan Analisis Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Puskesmas.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain :

1. Penelitian Anggraini Wahyuning Tiyas, yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Piutang Bpjs (Studi Kasus Rsud Kertosono, Rsud Jombang, Dan Rsud Kabupaten Kediri”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana piutang BPJS Kesehatan di RSUD Kertosono, RSUD Jombang, dan RSUD Kabupaten Kediri. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada tingkat piutang BPJS di masing-masing rumah sakit. Menilai strategi yang telah diterapkan oleh ketiga rumah sakit dalam mengelola dan mengurangi piutang BPJS. Serta merumuskan rekomendasi atau saran untuk meningkatkan pengelolaan dan mengurangi piutang BPJS di ketiga rumah sakit tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Evaluasi

---

<sup>9</sup> Anggraini Wahyuning Tiyas. ”Analisis Pengelolaan Dana Piutang BPJS (Studi Kasus Rsud Kertosono, RSUD Jombang, Dan Rsud Kabupaten Kediri.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2019, 7(2).



pada pengelolaan dana piutang BPJS di ketiga rumah sakit menunjukkan variasi dalam kesuksesan dan kekurangan dalam penerapan kebijakan dan praktik pengelolaan piutang. Terdapat identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada tingkat piutang BPJS di masing-masing rumah sakit, beberapa di antaranya memiliki pengaruh yang lebih signifikan daripada faktor-faktor lainnya. Penilaian strategi yang diterapkan oleh rumah sakit dalam mengelola dan mengurangi piutang BPJS menunjukkan sejumlah keberhasilan, tetapi juga menghadapi tantangan dalam implementasinya.

2. Penelitian Listia Ayuni Nur Afifah, Septo Pawelas Arso, Eka Yunila Fatmasari, yang berjudul “Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Kapitasi Pada Klinik Pratama di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi efisiensi dan transparansi pengelolaan dana kapitasi di klinik-klinik pratama. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan penggunaan dana yang tepat dan efisien bagi setiap peserta program kesehatan, sekaligus menilai kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh klinik-klinik pratama yang menerima dana kapitasi. Evaluasi ini mencakup pengukuran tingkat kepuasan pasien, frekuensi kunjungan pasien, serta indikator kualitas lainnya yang relevan.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa klinik pratama dengan dana kapitasi besar memiliki fleksibilitas lebih dalam mengelola dana, sementara klinik pratama dengan

---

<sup>10</sup> Listia Ayuni Nur Afifah, Septo Pawelas Arso, Eka Yunila Fatmasari. “Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Kapitasi Pada Klinik Pratama di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 7(4), 2019 : 683-694.

dana kapitasi kecil memiliki keterbatasan dalam pengelolaannya. Selain itu, hampir semua tahapan dalam mekanisme pengelolaan dana kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) hanya diketahui oleh pemilik klinik pratama atau direktur, menunjukkan adanya keterbatasan akses informasi terkait proses tersebut.

3. Penelitian Rosdiyati, yang berjudul “Analisis Mekanisme Pencatatan dana BPJS dalam Laporan Keuangan Rumah Sakit X Berbasis Syari’ah di Kabupaten Lamongan”.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kendala atau masalah yang mungkin dihadapi oleh Rumah Sakit X berbasis syari'ah di Kabupaten Lamongan dalam mencatat dana BPJS dan menyajikannya dalam laporan keuangan. Tujuan ini adalah untuk menemukan potensi hambatan atau tantangan yang mungkin timbul saat menerapkan mekanisme pencatatan dana BPJS yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syari'ah.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan penelitian ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman tentang cara pencatatan dana BPJS pada laporan keuangan Rumah Sakit X berbasis syari'ah di Kabupaten Lamongan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan panduan untuk memperkuat tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi syari'ah dalam hal yang berkaitan

---

<sup>11</sup> Rosdiyati. "Analisis Mekanisme Pencatatan dana BPJS dalam Laporan Keuangan Rumah Sakit X Berbasis Syari'ah di Kabupaten Lamongan; Tinjauan PSAK NO. 45," *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 5(1),2021 : 210-217.

dengan BPJS.

4. Penelitian Wawan Saputra, Neng Seni Sulastri, yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Pendapatan di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tanjungpinang”.

Penelitian ini berfokus pada analisis prosedur akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan pendapatan di BPJS Cabang Tanjungpinang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pendapatan diakui, dicatat, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan atau masalah dalam pengelolaan pendapatan BPJS di cabang Tanjungpinang. Aspek-aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencakup pengakuan pendapatan, pengendalian internal, dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mengidentifikasi berbagai tantangan atau permasalahan yang dihadapi dalam mengelola pendapatan di cabang BPJS Tanjungpinang. Tantangan tersebut mencakup isu-isu terkait pengakuan pendapatan yang tepat, pengendalian internal yang efektif, dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku. Temuan penelitian menyoroti pentingnya memastikan bahwa proses akuntansi di BPJS Cabang Tanjungpinang mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Kepatuhan ini menjadi krusial

---

<sup>12</sup> Wawan Saputra, Neng Seni Sulastri. “Perlakuan Akuntansi Pendapatan di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tanjungpinang,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 2021 : 78-83.

karena dapat meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan organisasi secara keseluruhan.

5. Penelitian Turiman, Ratna Meisa Dai, Deasy Sylvia Sari. “Implementasi Kebijakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Di Kabupaten Bandung”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Puskesmas Katapang di Kabupaten Bandung melaksanakan kebijakan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dalam pelaksanaan operasional dan manajemen keuangannya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan evaluasi dampak dari penerapan PPK-BLUD, baik yang menghasilkan hasil positif maupun yang memiliki efek negatif, terhadap kinerja dan layanan yang diberikan oleh Puskesmas Katapang.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BLUD Puskesmas Katapang telah diterapkan dengan mengimplementasikan manfaat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 79 tahun 2018 dalam konteks khusus Puskesmas Katapang. Manfaatnya telah dirasakan oleh seluruh karyawan BLUD Puskesmas Katapang. Selain itu, hal ini juga berdampak positif pada peningkatan pelayanan yang disediakan oleh penyedia layanan kesehatan di Puskesmas Katapang yang juga dirasakan oleh masyarakat. Dengan penerapan BLUD di Puskesmas

---

<sup>13</sup> Turiman, Ratna Meisa Dai, Deasy Sylvia Sari. “Implementasi Kebijakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Di Kabupaten Bandung”. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 2021 : 87-103.

Katapang, kepentingan terkait jaminan jasa kesehatan yang berkualitas dapat ditingkatkan, dan akses mudah ke layanan kesehatan dapat dicapai melalui fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan telah meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan, serta jaminan penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini membuat layanan kesehatan menjadi lebih mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat karena fasilitas dan kualitas layanan yang ditingkatkan oleh Puskesmas.

6. Penelitian Nilatus Salamah, Miftahur Rahman, yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan”.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pandangan hukum Islam pada pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana konsep-konsep hukum Islam, seperti riba dan garar, diterapkan dalam pengelolaan dana BPJS Kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan sebagai evaluasi sejauh mana sistem pengelolaan dana BPJS Kesehatan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menekankan pentingnya memperhatikan pandangan hukum Islam dalam pengelolaan dana BPJS Kesehatan agar sesuai dengan nilai-nilai syariah

---

<sup>14</sup> Nilatus Salamah, Miftahur Rahman. “Pandangan Hukum Islam terhadap pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” *Kesehatan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2022 : 3803-3812.

dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam meningkatkan keberlanjutan dan kesesuaian dengan pandangan hukum Islam dalam pengelolaan dana dan operasionalnya.

7. Penelitian Fransiscus Nicodemus Naiola, Ria Lestari Mia Vlandrin Sinaga, yang berjudul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Klaim BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pakubaun Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dari proses klaim BPJS di Puskesmas Pakubaun dengan tujuan memastikan bahwa sistem informasi akuntansi yang digunakan dapat meningkatkan kelancaran proses klaim dan mengurangi waktu penyelesaian klaim. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi sistem informasi akuntansi yang telah diterapkan di Puskesmas Pakubaun untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta memastikan bahwa sistem tersebut dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu terkait klaim BPJS.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Puskesmas Pakubaun perlu memperhatikan pentingnya pendidikan formal untuk pengelola SIA yang lebih sesuai dengan bidangnya, seperti Akuntansi atau Akuntansi Sektor Publik. Selain itu, perbaikan dan

---

<sup>15</sup> Fransiscus Nicodemus Naiola, Ria Lestari Mia Vlandrin Sinaga. “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Klaim BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pakubaun Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten,” *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 2022 : 266-272.

perawatan peralatan SIA, terutama pemancar jaringan, perlu ditingkatkan untuk memastikan kelancaran proses klaim BPJS Kesehatan. Dengan peningkatan SDM dan peralatan yang optimal, diharapkan efisiensi dan akurasi dalam sistem informasi akuntansi klaim BPJS dapat ditingkatkan di Puskesmas Pakubaun.

8. Penelitian Million S. Tahapary, Anie V. Mundung, Sonya Rumondor, Jeane C. Lasut, yang berjudul “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Manado”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Manado terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam pengelolaan aset tetap, termasuk International Financial Reporting Standards (IFRS) atau standar akuntansi nasional. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan aset tetap di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Manado, yang mencakup penilaian penggunaan sumber daya, proses pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset tetap.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kantor BPJS Kesehatan Cabang Manado telah mengakui pengeluaran modal yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti biaya pemeliharaan kendaraan. Mereka telah menggunakan metode penyusutan garis lurus yang sesuai dengan PSAK No.16, di mana penyusutan

---

<sup>16</sup> Million S. Tahapary, dkk. “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Manado,” *Jurnal Akuntansi Vokasi*, 2022 : 44-58.

dilakukan pada saat aset tetap diperoleh dan siap untuk digunakan. Penghentian aset tetap oleh Kantor BPJS Kesehatan dilakukan melalui penjualan atau penghapusan ketika aset tersebut telah kehilangan manfaat yang signifikan, dan tindakan tersebut sesuai dengan PSAK No.16.

9. Penelitian Annisa Putri, Fauzi Arif Lubis, Reni Ria Armayani Hasibuhan, yang berjudul “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menilai praktik keuangan yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota agar memastikan bahwa seluruh operasional perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana jaminan yang dikumpulkan dari peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan kewajiban pembayaran klaim dapat terpenuhi dengan baik. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan investasi dalam sektor haram juga akan diawasi dan ditegakkan dalam seluruh proses pengelolaan dana dan pembayaran klaim tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Besaran pembagian hasil dari pengembangan investasi kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan ditentukan berdasarkan hasil dari pengembangan investasi yang diperoleh. Dengan demikian, setiap bulannya tidak akan

---

<sup>17</sup> Annisa Putri, dkk. “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah,” *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 2023 : 171-183.



sama dalam penentuan presentase pembagian hasil pengembangannya. Fluktuasi di pasar saham dapat memengaruhi hasil pengembangan tersebut, meskipun pembagian hasil pengembangan pada peserta paling sedikit 1% di atas suku bunga bank. Semua proses pengelolaan keuangan dilakukan secara terpusat, termasuk penentuan investasi, penempatan, dan jaminan.

10. Penelitian Alvin Potutu, Julie Abdullah, Wahyudin Hasan, yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Dana Bpjs Berdasarkan Permenkes No 28 Tahun 2014 Di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango”.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Puskesmas Kabila di Kabupaten Bone Bolango melaksanakan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 28 tahun 2014 terkait pengelolaan dana BPJS. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi cara pengelolaan dana BPJS di Puskesmas Kabila, termasuk rintangan atau kendala yang mungkin dihadapi serta faktor-faktor yang mendukung BPJS.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan Puskesmas Kabila yang belum menerapkan PPK-BLUD, situasi serupa juga ditemukan di beberapa Puskesmas di Kota Bitung seperti yang ditunjukkan dalam penelitian. Mereka menghadapi kendala dalam menyerap anggaran program dan kegiatan yang berasal dari

<sup>18</sup> Alvin Potutu, dkk. “Implementasi Pengelolaan Dana Bpjs Berdasarkan Permenkes No 28 Tahun 2014 Di Puskesmas Kabila Kabupaten. Ijen” *Indonesian Journal Of Economy And Education Economy*, 1(1), 2023 : 9-18.

dana kapitasi, terutama dalam pengadaan obat dan peralatan medis, meskipun penerimaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan tepat waktu. Karena Puskesmas Kabila belum menerapkan PPK-BLUD dalam pengelolaan keuangannya, mereka mengikuti pola pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28. Dalam menjalankan pengelolaan keuangannya, Puskesmas Kabila mematuhi prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang telah ditetapkan oleh Puskesmas Kabila sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Anggraini Wahyuning Tiyas, (2019). Analisis Pengelolaan Dana Piutang Bpjs (Studi Kasus Rsud Kertosono, Rsud Jombang, Dan Rsud Kabupaten Kediri).	Kedua penelitian ini terkait dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dalam konteks pelayanan kesehatan.	Perbedaan tentang proses pelayanan pasien BPJS dan pengelolaan dana piutang di rumah sakit, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan analisis Pengelolaan Dana BPJS di puskesmas.
2	Listia Ayuni Nur Afifah, Septo Pawelas Arso, Eka Yunila Fatmasari, (2019). Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Kapitasi Pada Klinik Pratama di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.	Kedua penelitian memiliki fokus pada aspek pengelolaan dana di fasilitas kesehatan.	Objek penelitian pada Klinik sedangkan yang dilakukan peneliti di Puskesmas
3	Rosdiyati, (2021).	Kedua penelitian	Perbedaan objek

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Analisis Mekanisme Pencatatan dana BPJS dalam Laporan Keuangan Rumah Sakit X Berbasis Syari'ah di Kabupaten Lamongan; Tinjauan PSAK NO. 45.	ini fokus pada pengelolaan dana BPJS yang sesuai dengan laporan keuangan puskesmas.	penelitian rumah sakit dan puskesmas, penelitian ini menggunakan pendekatan atau metodologi penelitian yang berbeda untuk mengumpulkan dan menganalisis data.
4	Wawan Saputra, Neng Seni Sulastri, (2021). Perlakuan Akuntansi Pendapatan di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tanjungpinang.	Persamaan penelitian ini sama menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, Penelitian ini berhubungan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).	Perbedaan berfokus pada aspek pengakuan dan pelaporan pendapatan di cabang BPJS Tanjungpinang. Sementara peneliti lakukan fokus tentang Analisis Pengelolaan Dana BPJS Puskesmas.
5	Turiman, Ratna Meisa Dai, Deasy Sylvia Sari, (2021). Implementasi Kebijakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Di Kabupaten Bandung.	menggunakan pendekatan kualitatif, Objek penelitian di Puskesmas.	Penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan PPK-BLUD di Puskesmas Katapang di Kabupaten Bandung, sedangkan yang fokus yang peneliti lakukan pada analisis pengelolaan dana BPJS di Puskesmas Kedungwungu.
6	Nilatus Salamah, Miftahur Rahman, (2022). Pandangan Hukum Islam terhadap pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.	Persamaan penelitian ini sama menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, Kedua penelitian memiliki	Perbedaan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai landasan teoretis untuk menganalisis pengelolaan dana BPJS Kesehatan. Sedangkan yang

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		keterkaitan dengan pengelolaan dana dalam layanan kesehatan.	peneliti lakukan pengeloaan dana Puskesmas
7	Fransiscus Nicodemus Naiola, Ria Lestari Mia Vlandrin Sinaga, (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Klaim BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pakubaun Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten.	Persamaan penelitian berhubungan dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan Puskesmas.	Perbedaan berfokus pada efisiensi dan akurasi proses klaim BPJS di Puskesmas Pakubaun dengan mengamati sumber daya manusia (SDM) dan peralatan SIA. Sedangkan peneliti lakukan fokus analisis dana BPJS di Puskesmas.
8	Million S. Tahapary, Anie V. Mundung, Sonya Rumondor, Jeane C. Lasut, (2022). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Manado.	Kedua penelitian melibatkan analisis keuangan BPJS.	Perbedaan penelitian pada aspek akuntansi dan pengelolaan aset tetap, sedangkan penelitian ini analisis dana BPJS secara keseluruhan di puskesmas, termasuk sumber dana, penggunaan dana, dan hasil keuangan.
9	Annisa Putri, Fauzi Arif Lubis, Reni Ria Armayani Hasibuhan, (2023). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Dalam Perspektif Manajemen Keuangan.	Persamaan penelitian berfokus pada pengelolaan dana BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang melibatkan keuangan dan aspek manajemen keuangan.	Penelitian berfokus pada dana jaminan dan klaim khususnya di cabang Medan Kota BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan yang peneliti lakukan berkaitan untuk analisis dana BPJS yang dikelola oleh Puskesmas

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
10	Alvin Potutu, Julie Abdullah, Wahyudin Hasan, (2023). Implementasi Pengelolaan Dana BPJS Berdasarkan Permenkes No 28 Tahun 2014 Di Puskesmas Kabila Kabupaten.	Persamaan fokus pada aspek pengelolaan dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terkait dengan layanan kesehatan yang disediakan di puskesmas.	Perbedaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis cara implementasi mekanisme pengelolaan dana BPJS di puskesmas Kabila Kabupaten.

Sumber : Diolah dari penelitian terdahulu.

Berdasarkan kajian yang telah dijelaskan tentang penelitian terdahulu bisa dijelaskan bahwa semua penelitian memiliki tujuan dan karakteristik masing-masing dalam menganalisis penelitian tentang Analisis Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

## B. Kajian Teori

### 1. Puskesmas

#### a. Definisi Puskesmas

Pengertian Puskesmas menurut Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyatakan Pusat Kesehatan Masyarakat yang berikutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat serta upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih memprioritaskan upaya preventif dan promotif di wilayah kerjanya.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI, No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

Puskesmas adalah sebuah entitas yang berfungsi sebagai organisasi yang melaksanakan upaya kesehatan secara keseluruhan, merata, terpadu, serta bisa diakses oleh masyarakat dengan biaya yang terjangkau, serta menerapkan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna. Puskesmas memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjaga kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya tanpa mengesampingkan pelayanan yang berkualitas kepada individu.

b. Tugas Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 pasal 4 tentang Puskesmas, tugas Puskesmas adalah sebagai berikut:

- 1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- 2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- 3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi

keluarga.<sup>20</sup>

c. Tujuan Puskesmas

Puskesmas bertujuan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat dengan prioritas pada kebijakan pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait. Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang mempunyai perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan serta kemampuan hidup sehat.<sup>21</sup>

## 2. Pengelolaan Dana

a. Pengertian Pengelolaan

Menurut skripsi yang disusun oleh Rahmatia Ramadhani, pengelolaan adalah suatu proses yang melibatkan penggerakan, organisasi, dan mobilisasi upaya manusia dalam mencapai tujuan

tertentu.<sup>22</sup> Definisi ini sejalan dengan definisi pengelolaan yang umumnya dikaitkan dengan manajemen, bahwa proses kegiatan yang diawali dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Pengelolaan memiliki konsep yang serupa dengan manajemen, karena pada sebuah organisasi, pengelolaan membutuhkan

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI, No 43 Tahun 2019 pasal 4 tentang Puskesmas.

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 pasal 2 (1) tentang Puskesmas.

<sup>22</sup> Rahmatia Ramadhani. "Pengelolaan Program Kegiatan Dakwah Mah'ad Al-Jamiah UIN Riau". (Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2021).

pelaksanaan tanggung jawab manajerial secara berkelanjutan. Tanggung jawab ini secara kolektif sering disebut sebagai fungsi manajemen.

b. Fungsi Pengelolaan

Menurut buku yang ditulis oleh Jamaluddin Majid menjelaskan bahwa sebuah organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tapi juga merupakan bentuk akuntabilitas pengelolaan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan atau organisasi menerapkan fungsi utama pengelolaan, yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengendalian (controlling).<sup>23</sup>

1) Perencanaan (Planning) : Perencanaan dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dengan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh organisasi. Perencanaan digunakan untuk :

Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai visi dan misi yang ditetapkan, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, dan menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2) Pengarahan (Actuating) : Proses ini melibatkan aktivitas operasional dari hari ke hari untuk menjaga kelancaran aktivitas

---

<sup>23</sup> Jamaluddin Majid. *Akuntansi Sektor Publik* (Sulawesi Selatan : Pusaka Amaida, 2019).



organisasi, antara lain melalui pemberian tugas kepada karyawan, penyelesaian masalah rutin, penyelesaian konflik dan komunikasi efektif.

3) Pengawasan (Controlling) : Pengendalian berfungsi untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Aktivitas manajerial ini memonitor implementasi suatu rencana dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik, yaitu informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan rencana.

c. Tujuan Pengelolaan

Menurut buku yang ditulis Afifuddin menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan adalah menentukan strategi batasan serta sarana tanggung jawab, pengukuran pengoperasian tugas dan rencana, target yang memenuhi kriteria hasil kualitas serta batasan waktu, serta menentukan standar kerja yang mencakup efisiensi dan efektivitas.<sup>24</sup>

d. PPK-BLUD

Menurut peraturan yang berlaku Badan Layanan Umum Daerah yang secara umum disingkat dengan BLUD diartikan sebagai (Permendagri No. 61/2007 Pasal 1 (1)) : Badan Layanan Umum Daerah yang secara umum disingkat dengan BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja

---

<sup>24</sup> Afifuddin. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. (Bandung: CV Alfabeta, 2010), 3.

Perangkat Daerah (UPTD) di lingkungan pemerintah daerah yang dibuat untuk memberikan pelayanan (*service*) terhadap masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa memprioritaskan mencari keuntungan, serta dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip produktivitas dan efisiensi.<sup>25</sup>

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) merupakan pola pengelolaan keuangan yang mengutamakan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.<sup>26</sup>

Sejak pelaksanaan program JKN pada tahun 2013, telah ada pembahasan tentang perubahan status Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perubahan Puskesmas menjadi

BLUD didasari oleh Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang memberikan keluwesan dan fleksibilitas.

Melalui penerapan PPK-BLU di Puskesmas, mereka dapat mengelola sumber daya manusia (SDM) secara mandiri. Ini berarti Puskesmas memiliki wewenang untuk merekrut tenaga profesional yang bukan PNS dan memberikan imbalan jasa sesuai dengan kontribusinya

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 tahun 2007 Pasal 1 (1) tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

<sup>26</sup> Nugroho Bramasto, dkk. *Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Menuju Kemandirian KPH*. (Jakarta : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2013) 14.

terhadap pelayanan Puskesmas.

Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Puskesmas memiliki peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Puskesmas akan memiliki otonomi dalam mengelola keuangannya dan tidak akan tergantung pada operasional dari Pemerintah Daerah (Pemda). Puskesmas dengan status BLUD sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 61 Tahun 2007 Pasal 2 mengenai Asas dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Puskesmas diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perubahan Puskesmas menjadi BLUD adalah langkah yang mungkin untuk diimplementasikan.<sup>27</sup>

Namun, Puskesmas menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan ketika mencoba menerapkan BLUD. Kompleksitas persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Puskesmas dan

keterbatasan sumber daya manusia di Puskesmas untuk menyiapkan persyaratan tersebut menjadi hambatan utama. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam menerapkan PPK-BLUD di Puskesmas mencakup penyusunan dan penyerahan dokumen, seperti surat pernyataan komitmen untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, standar pelayanan minimum,

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri. No 61 tahun 2007 Pasal 2 (7) tentang Asas dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

laporan keuangan utama, serta laporan audit terakhir atau ketersediaan untuk dilakukan audit secara independen. Puskesmas yang belum menggunakan sistem PPK-BLUD harus mengikuti aturan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Tetapi, mereka mempunyai opsi untuk mengajukan permohonan kepada pihak berwenang agar dapat menerapkan PPK-BLUD. Setelah permohonan disetujui, Puskesmas dapat mengimplementasikan PPK-BLUD dan mendapatkan lebih banyak kemudahan dalam mengelola keuangannya. Seluruh pendapatan BLUD dilakukan melalui rekening kas BLUD serta dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD. Seluruh pendapatan dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.<sup>28</sup>

### 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

#### a. Pengertian BPJS Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.<sup>29</sup> BPJS terdiri dari dua bagian, yaitu BPJS

<sup>28</sup> Yayasan Penabulu. *Mengelola Keuangan BLUD*. (Jakarta Pusat : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017) 3.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kesehatan adalah bentuk perlindungan dalam bidang kesehatan yang memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dasar kepada peserta. Program ini tersedia bagi setiap individu yang telah membayar iuran sendiri atau apabila iurannya ditanggung oleh pemerintah.

b. Manfaat BPJS Kesehatan

Beberapa manfaat BPJS Kesehatan menurut Perpres No. 82 Tahun 2018:

- 1) Setiap Peserta berhak mendapat Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif, termasuk alat kesehatan, pelayanan obat, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- 2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana terdiri atas Manfaat medis serta Manfaat nonmedis.
- 3) Manfaat medis sebagaimana diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan indikasi medis serta tidak dibedakan berdasarkan besaran Iuran Peserta.
- 4) Manfaat nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai besaran Iuran Peserta.<sup>30</sup>

c. Premi/iuran BPJS

---

<sup>30</sup> Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional mengatur tentang iuran BPJS Kesehatan. Berikut adalah informasi mengenai iuran BPJS Kesehatan menurut Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 28:

- 1) Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah Pusat.
- 2) Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Iuran bagi Peserta PPU dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
- 4) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dibayar oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta.<sup>31</sup>

d. Dana Kapitasi JKN

Menurut Permendagri nomor 28 tahun 2021, Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dana yang dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk membiayai pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN.<sup>32</sup> Dana kapitasi yang dibayarkan kepada puskesmas adalah hasil dari perkalian tarif kapitasi dengan jumlah peserta JKN yang terdaftar di puskesmas tersebut. Dana kapitasi yang telah diterima dari BPJS Kesehatan dapat langsung digunakan oleh puskesmas melalui rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN untuk berbagai keperluan.

---

<sup>31</sup> Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2018 Pasal 28 tentang Iuran Jaminan Kesehatan

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 28 tahun 2021 tentang Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dana kapitasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk jasa pelayanan dan biaya operasional. FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang menerima dana kapitasi dari BPJS Kesehatan wajib menggunakan setidaknya 60% dari dana tersebut untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode Jenis field reseach (penelitian Lapangan). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan kualitas dari suatu kejadian/fenomena/gejala sosial dimana makna dari kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan suatu konsep teori. Penelitian kualitatif menggambarkan permasalahan yang didasari oleh data-data yang sudah ada kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Peneliti memilih jenis field reseach untuk memahami yang ada dilapangan dengan proses mendapatkan keterangan guna tujuan penelitian tanya jawab, serta bertatap muka antara responden dan pewawancara. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang detail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam serta hasil analisis dokumen dan catatan. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat



postpositivistik. Metode ini disebut juga metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>33</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan format deskriptif. sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan. Dimana tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, serta menghasilkan gambaran akurat serta pengetahuan yang dapat digunakan dalam mendeskripsikan tentang suatu gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis karena dapat mengungkap data secara mendalam tentang Analisis Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

## **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan, sebelum penelitian dilakukan.<sup>34</sup> Penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas Kedungwungu yang terletak di Jl. Kalipait No. 37, Desa Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2013), h.7

<sup>34</sup> Tim penyusun, *Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2019), h.47

### C. Subjek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa saja yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>35</sup>

Teknik pengambilan sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti. Informan yang akan dipilih merupakan Bendahara JKN puskesmas, Koordinator BPJS puskesmas, dan kepala puskesmas. Hasil wawancara ini akan digunakan untuk analisis lingkungan internal dan eksternal.

Penentuan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti ini menggunakan Teknik wawancara, atau observasi langsung dilapangan dengan metode indepth interview sesuai dengan tujuan dari tema penelitian ini. Adapun subyek informan yang akan dipilih menjadi sumber informasi adalah sebagai berikut :

1. Bapak Heru Prasetyo Kepala Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.
2. Ibu Sriyatiningih Koordiantor BPJS Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.
3. Ibu Budi Fatmawati Bendahara JKN Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>35</sup> P Tim penyusun, *Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2019), h.47

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penentuan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standart data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

##### 1. Teknik Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada di objek penelitian.

Metode observasi ini akan dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan. Teknik observasi yang digunakan oleh peneliti ini adalah observasi non partisipasif dimana peneliti hanya saja sebagai pengamat saja, peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan maupun program yang sedang diteliti.<sup>36</sup>

Data yang akan peneliti peroleh dari observasi antara lain terkait mis persepsi Masyarakat Terhadap Pendapatan Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2013), h.227

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>37</sup>

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang termasuk dalam kategori indept interview dimana pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara jenis terstruktur. Dalam melaksanakan wawancara peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>38</sup>

Data yang ingin diperoleh dari wawancara ini terkait Analisis Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan-catatan kejadian yang sebelumnya terkait dengan penelitian ini. Dokumen ini metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan data-data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Dokumen menjadi sumber data yang digunakan oleh peneliti-peneliti sejak lama, karena banyak faktor yang membuat dokumen menjadi sumber data yang berguna untuk meakukan

---

<sup>37</sup> Fuad Hasan, *Metode Riset Bisnis* (Madura : UTM PRESS. 2020) h.57

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2013), h.228

uji dan penafsiran. Adapun yang akan peneliti peroleh dari dokumentasi ini yaitu :

- a. Dokumentasi-dokumentasi program kerja pegawai yang terkait dengan pendapatan Puskesmas Kedungwungu.
- b. Profil lengkap Puskesmas Kedungwungu kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.
- c. Data pengelolaan Dana BPJS Puskesmas Kedungwungu kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses sistematis untuk menyusun dan merangkum catatan lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta sumber lain, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkomunikasikan temuan mereka. Analisis data melibatkan proses pelacakan, pengaturan, penyelesaian, dan penyatuan informasi, mencari pola, dan menentukan bagian yang akan disampaikan sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu : a) pengumpulan data (*data collection*). b) kondensasi data (*data condensation*). c) penyajian data (*data display*). d) menarik kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verivicatio*).

---

<sup>39</sup> M Rizal Pahleviannur. dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo : Pradina Pustaka, 2022), h.137.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Merupakan tahap pertama dalam menganalisis data. Tahap ini, dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan aneka macam cara yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun data yang dikumpulkan peneliti yaitu terkait pendapatan yang ada di Lapangan.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi, data aksi dari catatan lapangan interview transkrip, berbagai dokumen, dan catatan lapangan. Dengan menggunakan kondensasi data akan lebih kuat data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa tahap yaitu : Pengrucutan (*Focusing*) dan Penyerdehanaan (*Simplifying*), Peringkasan (*Abstracting*) dan Transdormasi (*Transforming*).

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang diperluas (narasi). Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh gambaran informasi terkait Analisis Pengelolaan Dana BPJS Di Puskesmas.

4. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil akhir yang belum ada sebelumnya, Penarikan kesimpulan sebenarnya merupakan tahap penting dalam keseluruhan proses penelitian. Kesimpulan ini

didasarkan pada data penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara cermat. Kesimpulan ini merupakan hasil temuan baru yang muncul setelah menganalisis data penelitian. Kesimpulan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran yang lebih jelas tentang objek penelitian yang sebelumnya belum terdefinisi dengan baik.<sup>40</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah pengecekan untuk melihat seberapa valid data dilakukan. Keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data menggunakan berbagai sudut pandang.<sup>41</sup>

Triangulasi sumber adalah pengujian data dengan menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi ataupun dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang memiliki sudut pandang yang berbeda.

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam tahap ini, penjelasan akan dibeikan mengenai langkah-langkah pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pengembangan desain penelitian, pelaksanaan penelitian sesungguhnya, hingga penyusunan laporan penelitian.<sup>42</sup> Dan adapun yang dilakukan pada tahap ini yaitu :

---

<sup>40</sup> M Rizal Pahleviannur. dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo : Pradina Pustaka, 2022), h.141.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h.8

<sup>42</sup> Tim penyusun, *Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2019), h.92

1. Tahap persiapan

- a. Menyusun rencana penelitian seperti judul penelitian, konteks penelitian, tujuan penelitian.
- b. Memilih lapangan penelitian.
- c. Mengurus surat perizinan penelitian.
- d. Observasi ke lapangan.
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap pelaksanaan

- a. Memahami latar belakang yang akan menjadi tempat penelitian.
- b. Memasuki lapangan penelitian.
- c. Mengumpulkan dan menganalisis data.
- d. Serta melengkapi data yang belum lengkap.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini, peneliti secara bertahap telah mengembangkan struktur laporan hasil penelitian setelah menganalisis dan mengumpulkan data dalam format skripsi. Laporan penelitian mengikuti panduan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Puskesmas

Puskesmas kedungwungu merupakan salah satu puskesmas milik pemerintah yang terletak di Jalan Kalipait Desa Kedungwungu kecamatan Tegaldlimo Banyuwangi dengan jumlah penduduk sebesar 26.531 jiwa dengan perincian kepala keluarga sebanyak 8.416 KK. Adapun wilayah batasan-batasan Puskesmas Kedungwungu yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedunggebang, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Desa Tegaldlimo.<sup>43</sup>

Wilayah kerja Puskesmas Kedungwungu 645.15 KM2, yang terdiri dari 4 desa yaitu : Desa Kedungwungu, Desa Kedungasri, Desa Kalipait, Desa Kendalrejo. Dimana Puskesmas Kedungwungu merupakan dataran rendah. Akses jalan semua desa bisa dilewati kendaraan rodan dua maupun roda empat.

Wilayah kerja di Puskesmas Kedungwungu terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga pelayanan kesehatan dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerja secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan,

---

<sup>43</sup> Heru Prasetyo, Kepala Puskesmas, Wawancara 19 September

diantaranya : Puskesmas induk 1 unit, Puskesmas pembantu 2 buah, Posyandu balita 39 buah, Poskesdes, 1 buah, Poskestren 1 buah, Posyandu lansia 4 buah, praktek dokter swasta 1 buah, praktek bidan swasta 10 buah, praktek perawat 8 buah.<sup>44</sup>

## 2. Visi dan Misi Puskesmas Kedungwungu

### a. Visi

“Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera, dan Berkah.”

### b. Misi

“Membangun SDM Unggul, Sehat Jasmani / Rohani Produktif dan Berkarakter.”

## 3. Tata Nilai :

Tata nilai yang diterapkan pada Puskesmas Kedungwungu adalah “BERKAH” (Bersih, Ramah, Konsisten, Handal) yakni sebagai berikut:

- a. Bersih, pelayanan yang diterapkan harus bersih petugas, alat, ruangan.
- b. Ramah, dalam memberikan pelayanan petugas melakukan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, santun).
- c. Konsisten, dalam pelayanan petugas harus konsisten terhadap waktu dan berpedoman dalam SOP.
- d. Handal, pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Heru Prasetyo, Kepala Puskesmas, Wawancara 19 September 2023

<sup>45</sup> Berdasarkan Data Dokumen Puskesmas, 19 September 2023

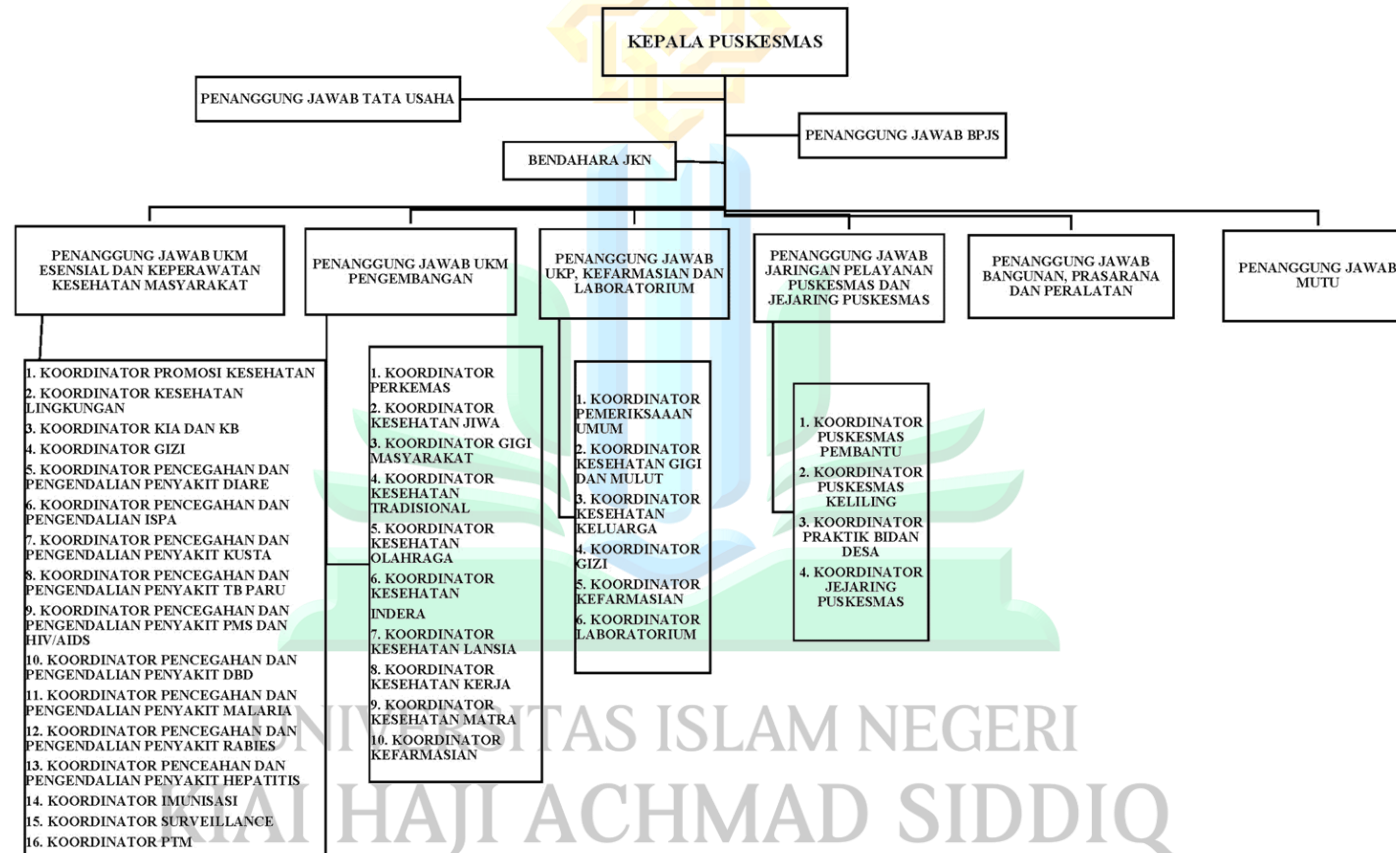
4. Tujuan :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan melalui penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja puskesmas kedungwungu.
- b. Memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- c. Memberikan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
- d. Terciptanya sumber daya manusia berakhlak.
- e. Terciptanya cipta puskesmas kedungwungu yang positif dan meningkatnya loyalitas pelanggan.
- f. Terselenggaranya tata nilai Puskesmas yang Bersih, Ramah, Konsisten, Handal.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Berdasarkan Data Dokumen Puskesmas, 19 September 2023

**Gambar 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS KEDUNGWUNGU<sup>47</sup>**



<sup>47</sup> Berdasarkan Data Dokumen Puskesmas, 19 September 2023

## 5. Pembagian tugas

### a. Kepala Puskesmas

- 1) Memantau dan menilai aktivitas yang berlangsung di puskesmas.
- 2) Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengobatan pasien sebagai bagian dari upaya penerimaan konsultasi rujukan.
- 3) Mengatur kegiatan penyuluhan kesehatan untuk masyarakat.
- 4) Mengoordinasikan kegiatan di tingkat kecamatan.
- 5) Membina staf puskesmas dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- 6) Melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan program kegiatan.
- 7) Berperan sebagai penggerak dalam pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan.
- 8) Membangun kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 9) Membimbing petugas untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- 10) Mengoordinasikan perkembangan Program Manajemen Kesehatan Dalam Keluarga (PMKD).
- 11) Mengatur koordinasi dengan sektor-sektor lain dalam upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja puskesmas.
- 12) Memberikan laporan tentang hasil program kegiatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, termasuk laporan yang bersifat rutin maupun laporan khusus.

13) Dalam peran sebagai dokter (fungsional), menjalankan tugas dalam pelayanan pemeriksaan dan pengobatan pasien di puskesmas.

14) Menerima konsultasi dari seluruh aktivitas yang terjadi di puskesmas.

b. Penanggung Jawab Tata Usaha

1) Memantau, mengevaluasi, serta menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan program dan aktivitas di puskesmas.

2) Mengatur dan berperan aktif dalam kegiatan di unit Tata Usaha (TU).

3) Menggantikan tanggung jawab kepala puskesmas jika kepala puskesmas tidak bisa hadir.

c. Koordinator BPJS / PIC BPJS

1) Menyusun rencana dan tujuan untuk tugasnya.

2) Melakukan pengendalian dokumen untuk pelaporan tugasnya.

3) Mengelola semua aktivitas sesuai dengan kebijakan yang berlaku dari BPJS di Puskesmas.

4) Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kondisi kerja, kemajuan, serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

d. Bendahara JKN/BPJS

1) Menjalankan aktivitas keuangan BPJS sesuai dengan rencana yang berasal dari lokakarya mini di puskesmas.

2) Bertanggung jawab dan menjalankan manajemen dana JKN dengan transparan sesuai dengan petunjuk teknis JKN.

- 3) Memberikan laporan mengenai pengeluaran dana JKN yang telah direalisasikan ke pihak tingkat Kabupaten/kota.
  - 4) Berpartisipasi dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) untuk perencanaan anggaran di puskesmas.
- e. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
- 1) Menyusun koordinasi untuk layanan promosi kesehatan, termasuk UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).
  - 2) Mengatur koordinasi layanan kesehatan lingkungan.
  - 3) Merencanakan koordinasi layanan KIA-KB (Kesehatan Ibu dan Anak - Keluarga Berencana) yang berfokus pada UKM (Usaha Kesehatan Mandiri).
  - 4) Menyelaraskan koordinasi layanan gizi yang berfokus pada UKM.
  - 5) Merancang koordinasi layanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
  - 6) Mengelola koordinasi layanan keperawatan kesehatan masyarakat.
  - 7) Mengarahkan koordinasi layanan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
  - 8) Menjalankan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala puskesmas.

f. Penanggung Jawab UKM Pengembangan

- 1) Pelayanan kesehatan mental.
- 2) Pelayanan kesehatan gigi untuk masyarakat.
- 3) Pelayanan kesehatan tradisional yang melengkapi.
- 4) Pelayanan kesehatan terkait olahraga.
- 5) Pelayanan kesehatan untuk organ indra.
- 6) Pelayanan kesehatan terkait pekerjaan.
- 7) Layanan kesehatan yang berbeda.

g. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

- 1) Mengkoordinasikan pelayanan pemeriksaan umum
- 2) Mengkoordinasikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
- 3) Mengkoordinasikan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP
- 4) Mengkoordinasi pelayanan gawat darurat
- 5) Mengkoordinasikan pelayanan gizi yang bersifat UKP
- 6) Mengkoordinasikan pelayanan persalinan
- 7) Mengkoordinasikan pelayanan rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap
- 8) Mengkoordinasikan pelayanan kefarmasian
- 9) Mengkoordinasikan pelayanan laboratorium
- 10) Mengkoordinasikan pelayanan evaluasi dan penyuluhan laporan pelaksanaan tugas
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala puskesmas



h. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- 1) Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan, puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas kesehatan
- 2) Jaringan pelayanan puskesmas sebagaimana terdiri atas: Puskesmas pembantu dan Puskesmas keliling.
- 3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: Klinik, Rumah sakit, dan Apoteker.
- 4) Puskesmas membantu sebagaimana dimaksud memberikan pelayanan kesehatan secara permanen dilokasi wilayah kerja puskesmas.
- 5) Puskesmas keliling sebagai mana dimaksudkan memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat diwilayah kerja puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung puskesmas

- 6) Puskesmas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.

i. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan

- 1) Merencanakan persyaratan sarana yang diperlukan di Puskesmas.
- 2) Menerima dan mengatur distribusi sarana yang telah diterima.
- 3) Menetapkan jadwal dan menjalankan perawatan sarana.
- 4) Mengawasi fungsi peralatan medis sederhana.

- 5) Melaksanakan pengujian atau penyesuaian sederhana.
  - 6) Membuat catatan dan melaporkan hasil tindakan.
- j. Penanggung Jawab MUTU
- 1) Memberikan laporan kepada Ketua TIM Mutu.
  - 2) Menjamin bahwa pemahaman mengenai peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien di puskesmas ditingkatkan.

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

Proses penyajian data merupakan proses yang paling penting, dimana penyajian data dalam penelitian ini digunakan sebagai penguat dan nantinya data inilah yang akan dianalisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dalam penelitian ini.

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, maka peneliti menyajikan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai penguat atau sebagai alat pendukung dalam penelitian ini. Akan disajikan secara sistematis mengenai data-data hasil penelitian yang menetapkan pada fokus masalah “Analisis Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi”

### **Bagaimana Analisis Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi**

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten

Banyuwangi untuk memperoleh data dan informasi guna mendukung penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

### **1. Anggaran belanja puskesmas kedungwungu tahun 2022**

Dana pada Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi berasal dari BPJS Kesehatan yang dimana dana ini harus dianggarkan terlebih dahulu ke pemerintah Daerah untuk dicatat dalam kas daerah sebelum dapat digunakan untuk keperluan Puskesmas Kedungwungu. Dapat dilihat dari hasil wawancara dari Sriyatiningih selaku Koordinator BPJS berikut :

“Sumber dana utama Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi adalah BPJS Kesehatan, namun dana ini harus melalui proses penganggaran oleh Pemerintah Daerah terlebih dahulu sebelum dapat digunakan untuk mendukung keperluan operasional Puskesmas Kedungwungu”<sup>48</sup>

Pernyataan diatas juga ditambahkan oleh Budi Fatmawati selaku

Bendahara JKN mengenai anggaran belanja yang diperoleh BPJS Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi berikut ini :

”Adapun anggaran belanja Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2022 sebesar Rp. 316.714.977 yang dimana keseluruhan dana ini mencakup belanja langsung.”<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Sriyatiningih, Koordinator BPJS Puskesmas, Wawancara 20 September 2023

<sup>49</sup> Budi Fatmawati, Bendahara Puskesmas, Wawancara 20 September 2023

**Tabel 4.1**  
**Dana Kapitasi pada bulan Januari – Desember Anggaran 2022**

No	Bulan	Anggaran
1	Januari	Rp 20.024.100
2	Februari	Rp 30.082.050
3	Maret	-
4	April	Rp 25.170.327
5	Mei	Rp 29.056.500
6	Juni	Rp 29.961.000
7	Juli	Rp 30.055.500
8	Agustus	Rp 30.361.500
9	September	Rp 30.325.500
10	Oktober	Rp 30.492.000
11	November	Rp 30.564.000
12	Desember	Rp 30.622.500
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>Rp 316.714.977</b>

Sumber : Data diperoleh dari data hasil wawancara, 20 September 2023

## 2. Pengelolaan Dana BPJS Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi

**Tabel 4.2**  
**PER KODE REKENING BELANJA TAHUN 2022**

NO	Rekening Belanja	Alokasi Dana DPA	Total Belanja	Sisa Anggaran
1	Belanja bahan-bahan kimia	33.299.100,00	15.713.160,00	17.585.940,00
2	Belanja bahan - bakar dan pelumas	4.632.000,00	3.315.500,00	1.316.500,00
3	Belanja bahan - isi tabung gas	495.000,00	384.500,00	110.500,00
4	Belanja alat bahan – ATK	6.397.200,00	4.105.300,00	2.291.900,00
5	Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover	7.599.500,00	7.446.700,00	152.800,00
6	Belanja alat bahan - bahan cetak	14.054.600,00	11.081.200,00	2.973.400,00
7	Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor - benda pos	1.000.000,00	1.000.000,00	
8	Belanja alat bahan kegiatan kantor-bahan computer	2.430.000,00	2.163.900,00	266.800,00
9	belanja obat-obatan – obat	38.863.200,00	31.745.830,00	7.117.370,00
10	belanja obat-obatan - obat lainnya	3.125.000,00	2.939.850,00	185.150,00
11	belanja jasa tenaga Kesehatan	244.584.600,00	211.926.240,00	32.622.360,00
12	belanja jasa pelayanan transaksi keuangan	38.400,00	31.900,00	2.900,00
13	belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan	18.000.000	5.944.050,00	12.055.950,00
14	belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang	2.260.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
15	belanja alat pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan	1.200.000,00	1.199.910,00	90

	umum lainnya			
16	belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer parallel	5.150.000,00	5.070.000,00	80.000,00
17	belanja perjalanan dinas biasa	5.957.000,00	2.010.00,00	2.747.000,00
18	jumlah belanja barang & jasa	389.046.000,00	308.407.340,00	80.638.660,00
19	belanja modal personal computer	18.535.000,00	-	18.535.000,00
20	Jumlah belanja peralatan dan mesin	18.535.000,00	-	18.535.000,00

Sumber : Data diperoleh dari data hasil wawancara, September 2023

Berdasarkan tabel diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.21 tahun 2016 bahwa Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk dukungan biaya operasional meliputi tabel diatas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Budi Fatmawati selaku bendahara JKN Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi dapat disimpulkan bahwa :

“Tabel diatas merupakan Kode Rekening Belanja pengelolaan dana belanja tahun 2022 Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldimo Kabupaten Banyuwangi yang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pengelolaan daerah Kabupaten Banyuwangi.”<sup>50</sup>

Hasil wawancara diatas diperkuat dengan Peraturan menteri kesehatan No.28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Program Jaminan kesehatan menentukan bahwa bagi puskesmas yang belum menerapkan PPK-BLUD, pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan daerah. Puskesmas Kedungwungu merupakan salah satu Puskesmas di kabupaten Banyuwangi yang belum menerapkan PPK-BLUD, maka pengelolaan dananya di sesuaikan dengan peraturan menteri kesehatan No.28 yang berbunyi pengelolaan dan pemanfaatan dana

<sup>50</sup> Budi Fatmawati, Bendahara Puskesmas, Wawancara 20 September 2023

kapitasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan daerah.

Pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan Sriyatiningih selaku Koordinator BPJS Puskesmas berikut ini :

“Puskesmas Kedungwungu masih menggunakan sistem pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam pengelolaan daerah. Hal ini dikarenakan bahwa Puskesmas Kedungwungu belum menerapkan PPK-BLUD, dan dalam pengelolaannya mengikuti beberapa prosedur, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka, Pengelolaan dana BPJS pada puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi melewati beberapa prosedur sebagai berikut:

a. Planning (Perencanaan)

Berdasarkan hasil wawancara dari Sriyatiningih selaku Koordinator BPJS Puskesmas mengatakan bahwa:

”Sistem pembayaran Puskesmas Kedungwungu menggunakan sistem pembayaran dimuka dengan konsekuensi pelayanan kesehatan dilakukan sebelum peserta BPJS jatuh sakit. Sistem ini mendorong fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk beroperasi dengan efektif dan efisien dengan fokus utama pada upaya promosi dan preventif. Setiap tanggal 15 setiap bulan, BPJS Kesehatan memberikan alokasi dana kepada fasilitas tingkat pertama.”<sup>52</sup>

Pernyataan di atas didukung juga pernyataan oleh Budi Fatmawati selaku Bendahara JKN Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi bahwa :

---

<sup>51</sup> Sriyatiningih, Koordinator BPJS Puskesmas, Wawancara 23 September 2023

<sup>52</sup> Sriyatiningih, Koordinator BPJS Puskesmas, Wawancara 23 September 2023

“Puskesmas memperoleh dana dari BPJS yang di transfer langsung orang BPJS ke Rekening Puskesmas Kedungwungu pada tanggal 15 setiap bulan, apabila pada tanggal 15 ini bertepatan dengan tanggal merah bisa di undur ke tanggal 16 atau 17”.<sup>53</sup>

Dari wawancara yang dilakukan dengan Sriyatiningih selaku Koordinator BPJS Puskesmas didapatkan hasil wawancara sebagai berikut :

“Belanja dan Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dibuat oleh kepala FKTP kemudian disampaikan kepada kepala SKPD dinas kesehatan. Berdasarkan belanja serta rencana pendapatan dana kapitasi ini, kepala SKPD dinas kesehatan menata RKA-SKPD dinas kesehatan yang berisi rencana pendapatan dana kapitasi JKN serta rencana belanja dana kapitasi JKN. Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan pada kelompok PAD, jenis lain PAD, objek dana kapitasi JKN pada FKTP, rincian objek dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening.”<sup>54</sup>

Hasil wawancara di atas juga diperkuat dengan pernyataan dari Heru Prasetyo selaku Kepala Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi yaitu :

“kita dipuskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi ini yang mengatur rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yaitu saya sendiri selaku kepala puskesmas Kedungwungu dan menyampaikannya kepada kepala SKPD dinas kesehatan Kabupaten Banyuwangi”.<sup>55</sup>

Wawancara diatas didukung dengan pernyataan dari Budi Fatmawati selaku Bendahara JKN Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi :

“Puskemas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi pada setiap bulan ke 4 (empat) pada tahun berjalan melakukan

<sup>53</sup> Budi Fatmawati, Bendahara Puskesmas, Wawancara 23 September 2023

<sup>54</sup> Sriyatiningih, Koordinator BPJS Puskesmas, Wawancara 23 September 2023

<sup>55</sup> Heru Prasetyo, Kepala Puskesmas, Wawancara 26 September 2023

penganggaran dengan membuat ulasan anggaran atau RAK setelah menerima dana kapitasi pada tiga bulan sebelumnya. Dana tersebut langsung di bayarkan setiap bulan oleh BPJS kerekening puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan banyaknya peserta BPJS yang terdaftar dalam lingkup wilayah kerja puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi.<sup>56</sup>

Sistem pembayaran dimuka mengharuskan peserta BPJS Kesehatan untuk membayar premi sebelum menerima pelayanan kesehatan. Konsekuensinya adalah peserta BPJS harus membayar premi mereka sebelum mereka benar-benar jatuh sakit. Ini mendorong kesadaran akan kebutuhan untuk menjaga kesehatan dan pencegahan penyakit. Sistem ini mendorong fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti Puskesmas, untuk bertindak secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kesehatan. Selain itu, sistem ini juga mengutamakan kegiatan promotif dan preventif, yang berarti upaya untuk mencegah penyakit dan mempromosikan kesehatan menjadi prioritas.

BPJS Kesehatan memberikan dana kepada Fasilitas Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, setiap tanggal 15 tiap bulan. Ini menunjukkan adanya keteraturan dalam penyaluran dana, yang memungkinkan FKTP untuk merencanakan penggunaan dana dengan lebih baik. Dalam situasi tertentu, penyaluran dana dapat diundur jika tanggal 15 bertepatan dengan hari libur (tanggal merah). Ini

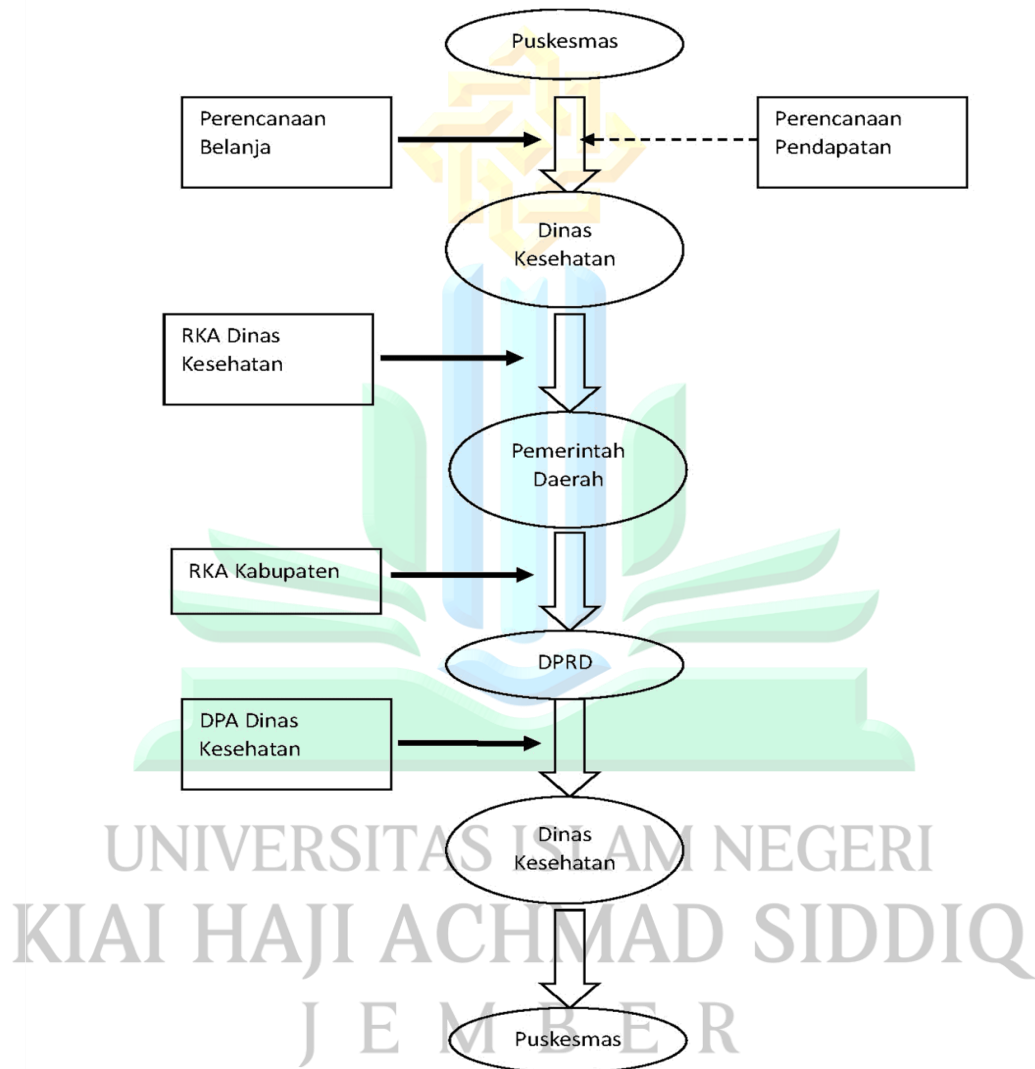
---

<sup>56</sup> Budi Fatmawati, Bendahara Puskesmas, Wawancara 26 September 2023



menunjukkan fleksibilitas dalam pengaturan penyaluran dana untuk meminimalkan gangguan dalam operasional puskesmas.

**Gambar 4.2**  
**Alur Penganggaran Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi**



Keterangan : a)  $\longrightarrow$  = Dilaksanakan  
b)  $\dashrightarrow$  = Belum dilaksanakan

Sumber : Data diperoleh dari dokumen hasil wawancara, 26 September 2023

Berdasarkan alur penganggaran diatas Sriyatiningih selaku Koordinator BPJS juga mengatakan bahwa :

“Dalam alur penganggaran diatas dapat kita lihat bahwa rencana belanja puskesmas didampaiakan ke dinas kesehatan pemerintah kabupaten banyuwangi yang selanjutya akan diusulkan menjadi RKA dinas kesehatan yang memuat pendapatan dan belanja kapitasi JKN di puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi. Dan selanjutnya akan mengikuti proses pengesahan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>57</sup>

#### b. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dari Sriyatiningih selaku Koordinator BPJS mengatakan:

“Sumber dana pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi yang tergabung dalam jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dari dana kapitasi BPJS kesehatan. Kepala FKTP menerima pembayaran secara pra upaya dari BPJS kesehatan berdasarkan kapitasi yang dibayarkan kepada FKTP.”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka, sumber dana Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi yang berpartisipasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berasal dari dana kapitasi BPJS Kesehatan. Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menerima pembayaran pra upaya dari BPJS Kesehatan yang didasarkan pada jumlah kapitasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Dana ini digunakan untuk mendukung operasional Puskesmas dan mencakup biaya perawatan dan layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN sebelum pelayanan kesehatan diberikan kepada

<sup>57</sup> Sriyatiningih, Koordinator BPJS Puskesmas, Wawancara 26 September 2023

<sup>58</sup> Sriyatiningih, Koordinator BPJS Puskesmas, Wawancara 26 September 2023

pasien. Jumlah pembayaran yang diterima oleh FKTP tergantung pada jumlah peserta JKN yang terdaftar di wilayah Puskesmas tersebut.

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan dari Budi Fatmawati selaku Bendahara JKN Puskesmas bahwa :

“Dana kapitasi dari BPJS Kesehatan untuk FKTP, termasuk Puskesmas Kedungwungu di Kabupaten Banyuwangi, sepenuhnya digunakan untuk biaya operasional dan pelayanan kesehatan. Dana ini merupakan pembayaran bulanan yang didasarkan pada jumlah peserta terdaftar, tanpa mempertimbangkan jenis atau jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.”<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka, Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan digunakan sepenuhnya untuk menutup biaya pelayanan kesehatan dan operasional kesehatan. Dana ini merupakan pembayaran bulanan yang diberikan kepada FKTP, termasuk Puskesmas Kedungwungu di Kabupaten Banyuwangi. Dana kapitasi ini didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah tersebut.

Dengan kata lain, besarnya dana yang diterima oleh FKTP tidak bergantung pada jenis atau jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN.

Pentingnya diketahui bahwa dana kapitasi ini memiliki tujuan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional FKTP, termasuk Puskesmas, dan memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh peserta JKN tanpa memandang kompleksitas

---

<sup>59</sup> Budi Fatmawati, Bendahara Puskesmas, Wawancara 26 September 2023

atau frekuensi pelayanan medis yang mereka terima. Dana ini menjadi dasar untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

c. Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dari Sriyatiningih selaku Koordinator BPJS Puskesmas mengatakan :

“Tanggung jawab terkait dengan pendapatan dan pengeluaran dana ini dipikul oleh Bapak Heru Prasetyo, yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kedungwungu. Beliau bertugas untuk mengelola aspek-aspek keuangan Puskesmas dan melaporkan informasi terkait pendapatan dan pengeluaran tersebut kepada instansi yang bersangkutan di dinas kesehatan atau dinas terkait.”<sup>60</sup>

Pernyataan diatas Didukung pernyataan dari Heru Prasetyo selaku Kepala Puskesmas bahwa :

“Iya, terkait pendapatan dan pengeluaran dana kapitasi dari BPJS saya sendiri yang bertanggung jawab sepenuhnya serta memberikan laporan tersebut ke Dinas Kabupaten Banyuwangi.”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka, Kepala Puskesmas secara resmi dan faktual bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana kapitasi JKN. Penerimaan dan pengeluaran yang dimaksud dicatat dalam laporan keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan, kepala SKPD Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk menyusun laporan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana

<sup>60</sup> Sriyatiningih, Koordinator BPJS Puskesmas, Wawancara 27 September 2023

<sup>61</sup> Heru Prasetyo, Kepala Puskesmas, Wawancara 27 September 2023

kapitasi ini, serta mengikutsertakannya dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan pernyataan diatas Budi Fatmawi selaku Bendahara JKN Puskesmas juga mengatakan bahwa :

“Saya selaku bendahara bertanggungjawab mencatat semua pengeluaran dan belanja dana kapitasi setiap bulan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban. Ini bertujuan untuk mengawasi alokasi dana kapitasi yang diterima dari BPJS Kesehatan dan memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. laporan tanggungjawab yang akan disusun untuk disampaikan dalam rapat Mini Lokakarya (Minlok) sebelum diteruskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, bentuk kontrol internal ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kapitasi yang digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas Kedungwungu.”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka, Mini Lokakarya (Minlok) adalah agenda bulanan yang diadakan di puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi setiap akhir bulan. Salah satu item dalam agenda Minlok ini adalah penyampaian laporan oleh Bendahara Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi mengenai pengelolaan dana kapitasi selama bulan tersebut. Setelah pelaksanaan Minlok, Bendahara Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

Pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi terbilang transparan. Setiap staf yang

---

<sup>62</sup> Budi Fatmawati, Bendahara Puskesmas, Wawancara 27 September 2023

memberikan layanan di puskesmas tersebut memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan penggunaan dana kapitasi dan bagaimana cara dana tersebut dikelola.

### 3. Pemanfaatan Dana

Berdasarkan hasil wawancara dari Sriyatiningih selaku Koordinator BPJS Kesehatan mengatakan bahwa :

"Seluruh dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterima oleh Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi digunakan sepenuhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional sesuai peraturan Menteri Kesehatan. Ini mencakup pelayanan kesehatan individu oleh staf kesehatan dengan latar belakang kesehatan dan non-kesehatan. Dana kapitasi juga digunakan untuk biaya operasional, seperti obat-obatan, peralatan kesehatan, dan komponen lain yang diperlukan dalam layanan kesehatan, dengan fokus pada menjaga kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan serta kelancaran operasional Puskesmas."<sup>63</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Budi Fatmawati selaku bendahara JKN bahwa :

"Ya, dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditransfer ke rekening Bendahara Puskesmas Kedungwungu yang saya kelola, dan saya yang mencatat semua biaya operasional, obat-obatan, peralatan kesehatan, serta komponen lain yang diperlukan dalam layanan kesehatan."<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka, Puskesmas Kedungwungu di Kabupaten Banyuwangi memanfaatkan seluruh dana kapitasi yang diterima dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mendukung layanan kesehatan dan biaya operasional. Langkah ini sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

<sup>63</sup> Sriyatiningih, Koordinator BPJS Puskesmas, Wawancara 29 September 2023

<sup>64</sup> Budi Fatmawati, Bendahara Puskesmas, Wawancara 29 September 2023

Dari 70% atau sekitar Rp 221.700.484 dana kapitasi digunakan untuk jasa kesehatan baik yang PNS maupun non-PNS dan untuk 30% atau sekitar Rp 95.014.493 digunakan untuk membiayai atau untuk mendukung biaya operasional. Penggunaan dana kapitasi mencakup berbagai jenis layanan kesehatan yang diberikan kepada individu oleh staf kesehatan, termasuk mereka yang memiliki latar belakang dalam bidang kesehatan dan non-kesehatan.

Selain mendukung layanan kesehatan, dana kapitasi juga digunakan untuk menutup biaya operasional Puskesmas. Ini mencakup pengadaan obat-obatan, peralatan medis, dan komponen lain yang diperlukan dalam penyediaan layanan kesehatan. Pusat perhatian dalam pengelolaan dana kapitasi ini adalah menjaga kualitas layanan kesehatan yang disediakan dan memastikan kelancaran operasional Puskesmas agar peserta JKN dapat menerima pelayanan kesehatan berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

#### **4. Kendala dalam Pengelolaan Dana**

Puskesmas Kedungwungu menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam administrasi dana BPJS kesehatan, khususnya dalam pengelolaan dana kapitasi JKN, seperti yang diungkapkan oleh Budi Fatmawati selaku Bendahara JKN Puskesmas Kedungwungu dalam pernyataannya di bawah ini:

“Selama saya diangkat serta bergabung menjadi bendahara di puskesmas Puskesmas benar ada beberapa yang kami alami pada pengelolaan dana khususnya pengelolaan dana kapitasi ini, seperti

saat mencairkan dana, juga saat transfer dana serta saat ada perencanaan yang tidak diakomodir atau di setujui oleh Pemda.”<sup>65</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Heru Prasetyo selaku Kepala Puskesmas bahwa :

“Ya, karena Puskesmas Kedungwungu salah satu Puskesmas yang belum menerapkan PPKBLUD, yang mana Puskesmas yang sudah menerapkan PPK-BLUD lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya sehingga dapat mengelola dana dan sumber daya secara lebih efisien dan efektif. Sedangkan Puskesmas Kedungwungu masih sesuai peraturan Dinas Kabupaten Banyuwangi sehingga adanya berbagai kendala seperti berikut.”<sup>66</sup>

a. Pencairan Dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budi Fatmawati selaku Bendahara JKN Puskesmas bahwa :

“Proses pencairan Dana Kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan sering mengalami hambatan. Terjadi karena dana tersebut dialokasikan ke kas daerah melalui rekening daerah, dan proses pencairan harus mengikuti prosedur yang rumit dengan mengajukan usulan anggaran kepada Dinas Kesehatan. Di Puskesmas Kedungwungu, akses ke dana ini melibatkan berbagai prosedur. Terkadang, meskipun APBD sudah disahkan sebelum tahun berakhir, pencairan dana bisa tertunda, sementara operasional Puskesmas harus terus berjalan.”<sup>67</sup>

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan dari Sriyatiningsih selaku Koordinator BPJS Puskemas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi bahwa :

“Prosedur pencairan dana yang rumit dan melibatkan beberapa langkah di Puskesmas Kedungwungu seringkali menjadi penghambat dalam proses pencairan Dana Kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan. Akibatnya, pencairan sering tertunda, meskipun APBD sudah disetujui sebelum tahun berakhir, dan

<sup>65</sup> Budi Fatmawati, Bendahara Puskesmas, Wawancara 29 September 2023

<sup>66</sup> Heru Prasetyo, Kepala Puskesmas, Wawancara 29 September 2023

<sup>67</sup> Budi Fatmawati, Bendahara Puskesmas, Wawancara 29 September 2023



ini mengharuskan operasional Puskesmas untuk tetap berjalan.”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka, proses pencairan dana BPJS kesehatan, yang disebut sebagai Dana Kapitasi JKN, seringkali mengalami hambatan atau kendala. Hal ini disebabkan karena dana tersebut telah dialokasikan ke kas daerah melalui rekening daerah. Permintaan pencairan dana ini tidak mudah, dan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, yaitu melalui usulan anggaran kepada Dinas Kesehatan. Di Puskesmas Kedungwungu, untuk mengakses dana ini, beberapa prosedur harus diikuti.

Seperti yang diketahui, proses persetujuan APBD hingga pencairan dana membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara operasional Puskesmas terus berlangsung. Meskipun APBD disahkan sebelum akhir tahun, namun pencairan dana seringkali tidak sesuai dengan harapan. Begitupun dengan dana yang di transfer BPJS pusat tidak serta merta dapat di gunakan Puskesmas karena harus melalui mekanisme APBD daerah.

#### b. Transfer Dana

Berdasarkan hasil wawancara Budi Fatmawati selaku Bendahara JKN juga mengatakan adanya kendala transfer dana berikut:

“Dana yang ditransfer ke rekening Bendahara Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi yang saya kelola hanya bersifat sementara karena harus dialihkan lagi oleh bendahara

---

<sup>68</sup> Sriyatiningsih, Koordinator BPJS Puskesmas, Wawancara 29 September 2023

Puskesmas ke kas daerah dan dicatat dalam pembukuan pendapatan daerah. Hal ini menjadi kendala karena pengadaan dana ini melibatkan proses penganggaran dan persetujuan dari DPRD Kabupaten Banyuwangi, yang dapat menghambat pencairan dana Puskesmas.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka, dana yang di transfer ke rekening bendahara Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi bersifat sementara saja karena perlu di transfer lagi oleh bendahara puskesmas pada kas daerah guna di catat di pembukuan pendapatan daerah. Hal ini membuat kendala karena guna mendapatkan dana tersebut perlu melalui penganggaran serta persetujuan DPRD kabupaten Banyuwangi serta proses ini akan menahan pencairan dana puskesmas.

c. Perencanaan yang tidak diakomodir

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budi Fatmawati selaku Bendahara Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi bahwa :

“Puskesmas Kedungwungu harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi agar layanan kesehatan dan obat-obatan tersedia. Namun, seringkali usulan yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan awal yang telah diajukan oleh Puskesmas Kedungwungu. Hal ini menjadi hambatan yang dapat mengganggu proses operasional di Puskesmas Kedungwungu.”<sup>70</sup>

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Sriyatiningih selaku Koordinator BPJS Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

<sup>69</sup> Budi Fatmawati, Bendahara Puskesmas, Wawancara 29 September 2023

<sup>70</sup> Budi Fatmawati, Bendahara Puskesmas, Wawancara 30 September 2023

“Ya, kita Puskesmas Kedungwungu harus mengajukan permintaan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi untuk menyediakan layanan kesehatan dan obat-obatan. Tetapi, seringkali permintaan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan awal Puskesmas Kedungwungu, yang dapat menghambat proses operasional mereka.”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka, Puskesmas Kedungwungu mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan dan obat-obatan. Permohonan ini dimaksudkan agar dapat dimasukkan dan dibahas dalam APBD tahun yang berjalan. Namun, seringkali usulan yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan awal yang telah diajukan oleh Puskesmas Kedungwungu. Hal ini menjadi hambatan yang dapat mengganggu proses operasional di Puskesmas Kedungwungu.

### **C. Pembahasan Temuan**

Setelah proses penyajian data dan analisis data, proses selanjutnya yaitu pembahasan temuan-temuan penelitian yang telah diperoleh saat penelitian berlangsung berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini membahas tentang Analisis Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Berikut beberapa hal yang disajikan sebagai data temuan :

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa pengelolaan dana BPJS masih sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Banyuwangi karena

---

<sup>71</sup> Sriyatiningsih, Koordinator BPJS Puskesmas, Wawancara 30 September 2023

Puskesmas Kedungwungu belum menerapkan PPK BLUD, Karena terdapat keuntungan yang diperoleh ketika fasilitas umum tersebut telah mengimplementasikan PPK-BLUD dalam pengelolaan keuangannya.

Menurut Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Beberapa keuntungan puskesmas yang sudah menerapkan PPK-BLUD yaitu : pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, dimana puskesmas mengelola sendiri keuangannya. Tanpa tergantung operasional kepada Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pendidikan masyarakat melalui praktik bisnis yang sehat.<sup>72</sup>

Dana untuk Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi diperoleh dari BPJS Kesehatan. Namun, sebelum digunakan, dana tersebut harus dianggarkan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah dan dicatat dalam kas daerah. Pada tahun 2022, anggaran belanja Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi mencapai Rp. 316.714.977, yang mencakup seluruh belanja yang diperlukan untuk operasional Puskesmas tersebut.

Puskesmas Kedungwungu merupakan salah satu Puskesmas di kabupaten Banyuwangi yang belum menerapkan PPK-BLUD. Dengan hasil tersebut, sependapat dengan pernyataan dari Yayasan Penabulu bahwa Puskesmas yang belum menerapkan PPK-BLUD masih mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Namun, Puskesmas dapat mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang untuk menerapkan

---

<sup>72</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

PPK-BLUD. Setelah permohonan disetujui, Puskesmas dapat menerapkan PPK-BLUD dan memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Seluruh pendapatan BLUD digunakan melalui rekening kas BLUD serta dicatat di kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada jenis lainnya pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD. Seluruh pendapatan dilaporkan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan<sup>73</sup>. Proses perencanaan atau alokasi dana kapitasi BPJS di Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi masih di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 bahwa pengelolaan keuangannya mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Daerah. Sejalan dengan hasil penelitian dari yang dilakukan oleh Potutu, A., Abdullah, J., dan Hasan, W, dengan judul “Implementasi Pengelolaan Dana BPJS Berdasarkan Permenkes No. 28 Tahun 2014 Di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango” bahwa Proses Penganggaran atau perencanaan dana kapitasi BPJS di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 yangmana Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango untuk mengelola keuangannya memiliki ketergantungan operasional ke Pemerintah Daerah (PEMDA).<sup>74</sup>

Berdasarkan penelitian mekanisme yang dilakukan untuk pengelolaan dana BPJS pada Puskesmas Kedungwungu Kabupaten

---

<sup>73</sup> Yayasan Penabulu. *Mengelola Keuangan BLUD*. (Jakarta Pusat : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017) 3.

<sup>74</sup> Alvin Potutu, dkk. “Implementasi Pengelolaan Dana Bpjs Berdasarkan Permenkes No 28 Tahun 2014 Di Puskesmas Kabila Kabupaten. Ijen” *Indonesian Journal Of Economy And Education Economy*, 1(1), 2023 : 9-18

Banyuwangi sesuai dengan Teori Jamaluddin Majid adalah Planning (Perencanaan), Pelaksanaan, dan Pengawasan.<sup>75</sup>

Planning (Perencanaan) Dana kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS, yang merupakan FKTP milik pemerintah daerah yang belum berstatus BLUD, dapat digunakan setelah dianggarkan beserta perubahannya, baik dari sisi pendapatan (lain-lain PAD yang sah-dana kapitasi JKN pada FKTP) maupun belanja. Sistem pembayaran ini berbasis pembayaran di muka, dengan pelayanan kesehatan yang diberikan sebelum peserta BPJS jatuh sakit. Dana diterima setiap tanggal 15 tiap bulan dan langsung ditransfer ke rekening Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi. Dengan hasil tersebut, sependapat dengan pernyataan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bahwa bagi puskesmas yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka dalam mengelola dan memanfaatkan dana kapitasi JKN berlaku azas umum pelaksanaan APBD dan norma-norma penatausahaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Jamaluddin Majid. *Akuntansi Sektor Publik* (Sulawesi Selatan : Pusaka Amaid, 2019).

<sup>76</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Pelaksanaan Sumber dana Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berasal dari dana kapitasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Kepala FKTP menerima pembayaran berdasarkan kapitasi yang ditentukan oleh BPJS, dengan tarif yang telah disepakati bersama Asosiasi Fasilitas Kesehatan (AFK) di wilayah setempat, mengacu pada standar tarif kapitasi yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan. Dana kapitasi ini digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan dan operasional kesehatan di Puskesmas Kedungwungu sesuai dengan Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2016 tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Pembayaran kapitasi ini bersifat bulanan dan disesuaikan dengan jumlah peserta yang terdaftar, tanpa memperhitungkan jenis atau jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dengan hasil tersebut, sependapat dengan Perpres Nomor 32 tahun 2014 Pasal 8 (2) berbunyi Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan serta belanja kepada Kepala FKTP, lalu Kepala FKTP menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas bersangkutan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Sehingga timbul tanggung jawab renteng mulai dari Kepala FKTP, Kepala SKPD Kesehatan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/BUD serta Bendahara Kapitasi.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Peraturan Presiden No 32 tahun 2014 Pasal 8 (2)

Pengawasan penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan ketat. Kepala Puskesmas memiliki tanggung jawab resmi dan faktual terhadap penerimaan dan pengeluaran dana kapitasi JKN, yang diawasi dengan pencatatan dalam laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepala SKPD Dinas Kesehatan juga bertanggung jawab menyusun laporan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana kapitasi, serta memasukkannya dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan keuangan daerah yang berlaku. Dengan hasil tersebut, sesuai dengan Perpres No. 32 Tahun 2014 Pasal 11 bahwa Penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada puskesmas diawasi secara berjenjang oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas. Selain itu, dilakukan juga pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan secara berjenjang oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas, serta pengawasan fungsional oleh APIP tersebut dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.<sup>78</sup>

Proses pencairan dana BPJS Kesehatan yang disebut Dana Kapitasi JKN, seringkali terhambat karena dialokasikan ke kas daerah. Permintaan pencairan ini harus mengikuti prosedur dengan mengajukan usulan

---

<sup>78</sup> Peraturan Presiden No 32 tahun 2014 Pasal 11



anggaran kepada Dinas Kesehatan. Di Puskesmas Kedungwungu, beberapa prosedur harus diikuti.

Persetujuan APBD hingga pencairan dana memakan waktu yang lama, sementara Puskesmas harus tetap beroperasi. Meskipun APBD disahkan sebelum akhir tahun, pencairan dana seringkali tidak sesuai harapan. Dana yang ditransfer BPJS pusat juga tidak dapat segera digunakan oleh Puskesmas karena harus melalui mekanisme APBD daerah. Dengan hasil tersebut, sesuai dengan Permenkes Nomor 46 Tahun 2021 Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan digunakan melalui rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan dibenarkan sebagai pendapatan. pembayaran Dana Kapitasi oleh BPJS ke FKTP terlebih dahulu perlu ditransfer atau masuk dulu ke kas daerah kemudian bisa dipakai setelah diusulkan dalam dokumen anggaran melalui RKA (Rencana Kerja Anggaran) serta DPA (Daftar Pelaksanaan anggaran). Proses seperti ini tentu menjadi hambatan tersendiri bagi FKTP milik pemerintah daerah untuk bisa segera memanfaatkan dana tersebut guna memberikan pelayanan kesehatan<sup>79</sup>.

Dana yang ditransfer ke rekening bendahara Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi bersifat sementara karena perlu dipindahkan lagi ke kas daerah guna pencatatan pendapatan di daerah. Hal ini menyebabkan kendala karena guna memperoleh dana tersebut perlu melalui penganggaran dan persetujuan DPRD Kabupaten Banyuwangi

---

<sup>79</sup> Peraturan Presiden No.46 Tahun 2021 Pasal 7 Ayat 1

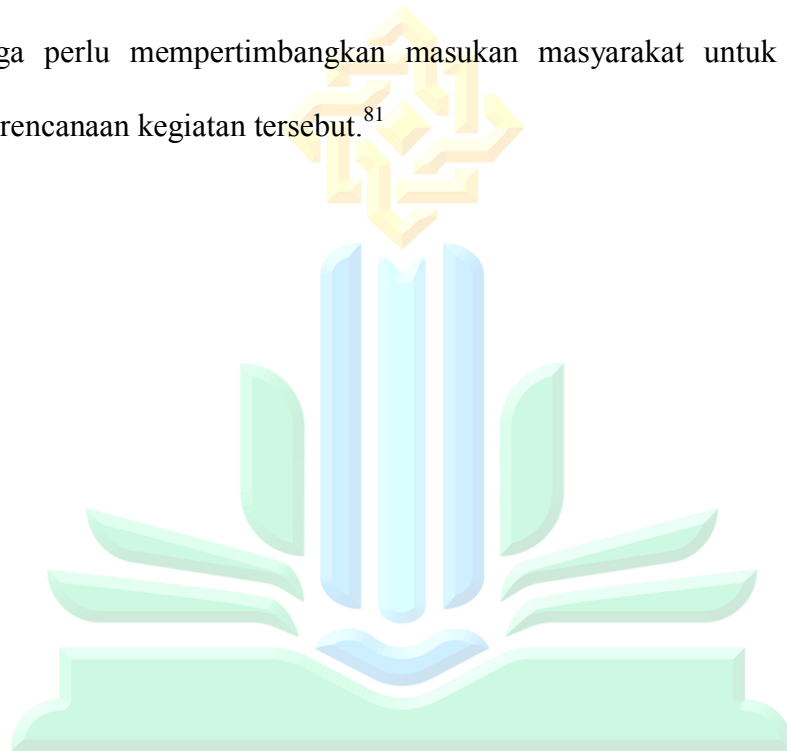
serta proses ini akan menahan pencairan dana puskesmas. Pernyataan di atas tidak sejalan dengan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ 2014 tentang Peraturan mengarahkan langkah-langkah teknis terkait alokasi anggaran, pelaksanaan, organisasi, dan pertanggungjawaban terkait Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dokumen ini menetapkan prosedur untuk mengatur dan memastikan bahwa dana kapitasi yang disalurkan oleh BPJS ke FKTP dikelola dan digunakan secara sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sesuai dan tepat dalam konteks keuangan negara<sup>80</sup>.

Perencanaan Puskesmas Kedungwungu mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk memasukkan kebutuhan layanan kesehatan dan obat-obatan dalam APBD tahun berjalan. Namun, usulan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan awal yang diajukan, mengganggu operasional Puskesmas. Untuk mengatasi hal tersebut pihak puskesmas sebaiknya menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Jika usulan tidak sesuai dengan kebutuhan awal, Puskesmas dapat melakukan pertemuan dan diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait untuk menjelaskan lebih rinci mengapa kebutuhan tersebut penting. Serta Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan yang diajukan mencerminkan prioritas kesehatan masyarakat secara lebih akurat. Ini juga dapat

---

<sup>80</sup> Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ 2014

memberikan dukungan politik untuk usulan tersebut. Dengan hasil tersebut, sependapat dengan Teori dari Departemen Kesehatan bahwa penyusunan rencana kegiatan Puskesmas diharapkan melihat berbagai kebijakan yang berlaku baik secara global, ataupun daerah sesuai dengan hasil kajian data serta informasi yang tersedia di puskesmas. Puskesmas juga perlu mempertimbangkan masukan masyarakat untuk membantu perencanaan kegiatan tersebut.<sup>81</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>81</sup> Departemen Kesehatan. *Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas Buku Seri 1*. (Jakarta : Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, 2006) h.7

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

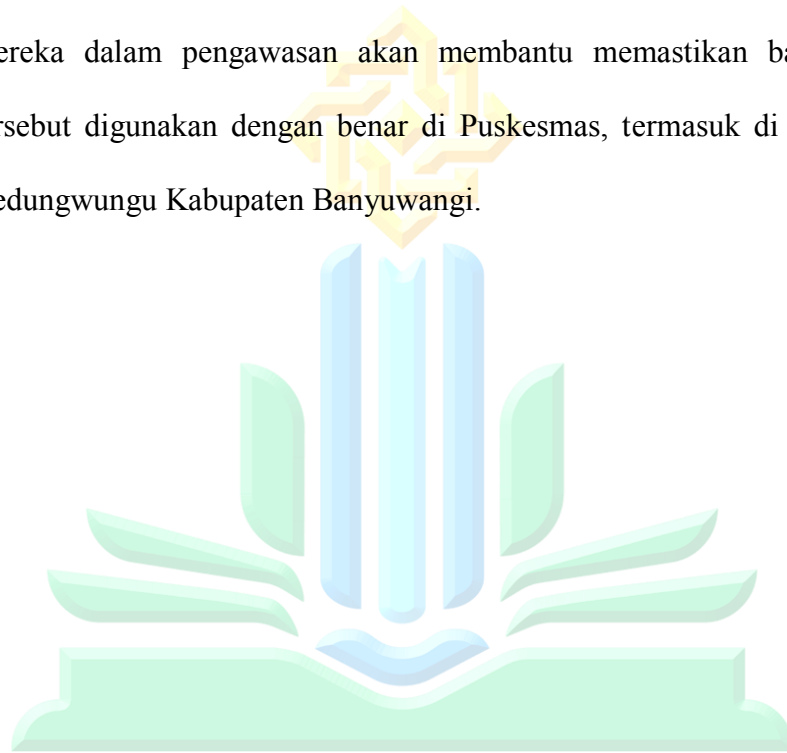
Pengelolaan dana kapitasi BPJS di Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi melibatkan beberapa mekanisme yang meliputi pengawasan, perencanaan, sumber dana serta pengendalian. Proses perencanaan atau alokasi dana kapitasi BPJS di Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi masih mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Daerah. Alangkah baiknya di zaman sekarang Puskesmas Kedungwungu segera menerapkan PPK-BLUD. Hal ini karena penerapan PPK-BLUD dapat memberikan banyak keunggulan yang dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan mereka. Salah satu keunggulannya adalah fleksibilitas dalam mengelola keuangan, di mana Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi dapat mengelola dana mereka sendiri tanpa bergantung pada dukungan operasional dari Pemerintah Daerah. Dengan demikian, mereka dapat berperan secara proaktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pendidikan serta perkembangan bangsa melalui praktik bisnis yang berkelanjutan.

#### **B. Saran**

1. Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi diharapkan segera menerapkan PPK-BLUD dengan mempertimbangkan keunggulan dan manfaatnya. Sehingga memberikan Puskesmas kemandirian dalam

pengelolaan keuangannya yang nantinya dapat mengelola dana dan sumber daya secara lebih efisien dan efektif.

2. BPJS pusat juga diharapkan turut serta untuk pengawasan terhadap proses pengelolaan dana kapitasi di setiap Puskesmas. Meskipun BPJS Kesehatan hanya bertanggung jawab untuk membayarkan dana kapitasi, keterlibatan mereka dalam pengawasan akan membantu memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar di Puskesmas, termasuk di Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, L. A. N., Arso, S. P., & Fatmasari, E. Y. "Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Kapitasi Pada Klinik Pratama di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang," *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 7(4), 2019 : 683-694.
- Afifuddin. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabetta, 2010.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- Bramasto Nugroho, dkk. *Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Menuju Kemandirian KPH*. Jakarta : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2013.
- Departemen Kesehatan. *Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas Buku Seri 1*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, 2006.
- Eni. "Pengelolaan Dana BPJS Sesuai Laporan Keuangan Puskesmas Bajo Kabupaten Luwu." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.
- Hasan Fuad. *Metode Riset Bisnis*. Madura : UTM PRESS. 2020.
- Majid Jamaluddin. *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan : Pusaka Amaida, 2019.
- Naiola, F. N., & Sinaga, R. L. M. V. "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Klaim BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pakubaun Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten," *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), (2022) : 266-272.
- Oktari, R. S., & Kurniawan, H. "Framework ketahanan puskesmas dalam menghadapi bencana." *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 16(1), (2016):44-52.
- Pahleviannur Rizal M. dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo : Pradina Pustaka, 2022.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 tahun 2007 pasal 2 Ayat 7 tentang Asas dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana JKN.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 1 tentang Puskesmas
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 tentang Puskesmas
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 tahun 2007 Pasal 1 (1) tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 28 tahun 2021 tentang Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Peraturan Presiden No 32 tahun 2014 Pasal 11.
- Peraturan Presiden No 32 tahun 2014 Pasal 8 (2).
- Peraturan Presiden No.46 Tahun 2021 Pasal 7 Ayat 1
- Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2018 Pasal 28 tentang Iuran Jaminan Kesehatan
- Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- Pertiwi, M., & Nurcahyanto, H. "Efektivitas program BPJS kesehatan di kota Semarang (studi kasus pada pasien pengguna jasa BPJS kesehatan di puskesmas Sronдол)," *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), (2017) :416-430.
- Potutu, A., Abdullah, J., & Hasan, W. "Implementasi Pengelolaan Dana Bpjs Berdasarkan Permenkes No 28 Tahun 2014 Di Puskesmas Kabila Kabupaten. Bone Bolango" *Indonesian Journal Of Economy And Education Economy*, 1(1), 2023 : 9-18.
- Putri, A., Lubis, F. A., & Hasibuhan, R. R. A. "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 2023 : 171-183.
- Ramadhani R. "Pengelolaan Program Kegiatan Dakwah Mah'ad Al-Jamiah UIN Riau". Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2021.
- Rosdiyati. "Analisis Mekanisme Pencatatan dana BPJS dalam Laporan Keuangan Rumah Sakit X Berbasis Syari'ah di Kabupaten Lamongan; Tinjauan PSAK NO. 45," *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan*

*Hukum*, 5(1), (2021) : 210-217.

Salamah, N., & Rahman, M. "Pandangan Hukum Islam terhadap pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," *Kesehatan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), (2022) : 3803-3812.

Saputra, W., & Sulastri, N. S. "Perlakuan Akuntansi Pendapatan di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tanjungpinang," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), (2021) : 78-83.

Sholiha, A. F., & Warsono, H. "Analisis Kualitas Pelayanan Program Jaminan hari Tua Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) 1 Ketenagakerjaan Cabang Ungaran," *Journal Of Public Policy And Management Review*, 7(4), (2018):180-191.

Siregar, M. "Analisis Pencatatan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Dalam Laporan Keuangan Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang". Skripsi, Universitas Tridianti, 2020.

Suawa, P. J., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)". *Jurnal Governance*, 1(2), (2021).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ 2014

Tahapary, M. S., Mundung, A. V., Rumondor, S., & Lasut, J. C. "Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Manado," *Jurnal Akuntansi Vokasi*, 2022 : 44-58.

Tim Penyusun. *Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember*. Jember : IAIN Jember Press, 2019.

Tiyas, A. W. "Analisis Pengelolaan Dana Piutang BPJS (Studi Kasus Rsud Kertosono, RSUD Jombang, Dan Rsud Kabupaten Kediri." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, (2019), 7(2).

Turiman, T., Dai, R. M., & Sari, D. S. "Implementasi Kebijakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Di Kabupaten Bandung". *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 2021 : 87-103.



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

Yayasan Penabulu. *Mengelola Keuangan BLUD*. Jakarta Pusat : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017.

Zaeni, Asyhadie. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasinta Salsabela

Nim : E20193086

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis ter kutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 08 November 2023



Yasinta Salsabela  
E20193086

PEDOMAN WAWANCARA  
ANALISIS PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL (BPJS) DI PUSKESMAS KEDUNGWUNGU KECAMATAN  
TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI

A. PERTANYAAN KEPADA KEPALA PUSKESMAS KEDUNGWUNGU  
KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI

1. Bagaimana sejarah berdirinya Puskesmas Kedungwungu kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana latar belakang berdirinya Puskesmas Kedungwungu kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?
3. Apa saja visi dan misi Puskesmas Kedungwungu kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?
4. Apa saja tata nilai Puskesmas Kedungwungu kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?
5. Apa tujuan pelayanan Puskesmas Kedungwungu kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?
6. Bagaimana struktur organisasi Puskesmas Kedungwungu kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?
7. Bagaimana mekanisme pengaturan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN di Puskesmas Kedungwungu, Kabupaten Banyuwangi?
8. Siapa yang bertanggungjawab dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran dana Puskesmas serta proses pelaporannya kepada instansi terkait di dinas kesehatan atau dinas terkait?
9. Bagaimana kendala dalam pengelolaan dana di Puskesmas?

B. PERTANYAAN KEPADA BENDAHARA PUSKESMAS  
KEDUNGWUNGU KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN  
BANYUWANGI

1. Bagaimana sumber dana Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi?

2. Bagaimana rincian Anggaran belanja dana kapitasi per bulan di tahun 2022?
3. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi untuk belanja tahun 2022 di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?
4. Bagaimana langkah yang harus diambil sebelum dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan Puskesmas?
5. Berapa jumlah anggaran dana yang diperoleh puskesmas dari kantor BPJS tahun 2022?
6. apa pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan?
7. Apa saja prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan dana BPJS pada Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi?
8. Bagaimana prosedur penerimaan dana dari BPJS oleh Puskesmas Kedungwungu?
9. Bagaimana proses penyusunan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di suatu FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)?
10. Siapa yang bertanggungjawab mencatat pengeluaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan bagaimana laporan tersebut disampaikan dalam rapat Mini Lokakarya (Minlok)?
11. Bagaimana Puskesmas Kedungwungu mengatasi hambatan dan keterlambatan dalam proses pencairan Dana Kapitasi JKN yang harus melalui prosedur yang rumit, terutama dalam konteks alokasi dana ke kas daerah dan pengajuan usulan anggaran kepada Dinas Kesehatan?
12. Bagaimana kendala dalam pengelolaan dana di Puskesmas ?
13. Bagaimana Puskesmas Kedungwungu dan mengatasi kendala yang muncul akibat pengalihan dana sementara ke kas daerah dan proses penganggaran serta persetujuan DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam pencairan dana?
14. Bagaimana Puskesmas Kedungwungu mengatasi masalah ketidaksesuaian antara usulan yang diajukan kepada pemerintah

daerah melalui Dinas Kesehatan dan kebutuhan awal yang telah diajukan, yang dapat menghambat operasional Puskesmas?

C. PERTANYAAN KEPADA STAFF BPJS PUSKESMAS KEDUNGWUNGU KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI

1. Bagaimana rincian Anggaran belanja dana kapitasi per bulan di tahun 2022?
2. Bagaimana mekanisme sistem pembayaran dimuka yang digunakan dalam BPJS kesehatan?
3. Bagaimana mekanisme pengaturan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN di Puskesmas Kedungwungu, Kabupaten Banyuwangi?
4. Bagaimana alur penganggaran dana kapitasi JKN pada Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi?
5. Bagaimana mekanisme penentuan jumlah dana kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas Kedungwungu di Kabupaten Banyuwangi?
6. Bagaimana pengelolaan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan di Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi memastikan ketersediaan dana untuk operasional dan layanan kesehatan?
7. Siapa yang bertanggungjawab dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran dana Puskesmas serta proses pelaporannya kepada instansi terkait di dinas kesehatan atau dinas terkait?
8. Bagaimana Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi memastikan bahwa seluruh dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) digunakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan?

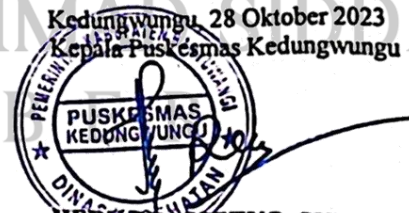
## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi	1. Analisis Pengelolaan Dana BPJS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran Belanja Puskesmas Kedungwungu tahun 2022</li> <li>2. Pengelolaan Dana BPJS Puskesmas Kedungwungu</li> <li>3. Pemanfaatan Dana JKN Puskesmas Kedungwungu</li> <li>4. Kendala dalam Pengelolaan Dana di Puskesmas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Primer Informan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kepala Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi</li> <li>b) Bendahara JKN Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi</li> </ol> </li> <li>2. Data Sekunder :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Buku</li> <li>b) Jurnal</li> <li>c) Berita</li> <li>d) Artikel</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Penelitian : Kualitatif Jenis Penelitian : Deskriptif</li> <li>2. Subjek Penelitian : <i>Purposive</i></li> <li>3. Lokasi Penelitian : Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi</li> <li>4. Teknik Pengumpulan Data :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Observasi</li> <li>b) Wawancara</li> <li>c) Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>5. Teknik Analisis Data :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengumpulan Data</li> <li>b) Kondensasi Data</li> <li>c) Penyajian Data</li> <li>d) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi</li> </ol> </li> <li>6. Teknik Keabsahan Data : Triangulasi Sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Analisis Pengelolaan Dana BPJS di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi</li> </ol>

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	18 September 2023	Menyerahkan surat izin penelitian	<i>R</i>
2	19 September 2023	Wawancara dengan Bapak Heru Prasetyo selaku Kepala Puskesmas	<i>R</i>
3	20 September 2023	Wawancara dengan Ibu Sriyatiningsih selaku Koordinator BPJS	<i>Ch</i>
4	20 September 2023	Wawancara dengan Ibu Budi Fatmawati Selaku Bendahara JKN	<i>L</i>
5	23 September 2023	Wawancara dengan Ibu Sriyatiningsih selaku Koordinator BPJS	<i>Ch</i>
6	23 September 2023	Wawancara dengan Ibu Budi Fatmawati Selaku Bendahara JKN	<i>L</i>
7	26 September 2023	Wawancara dengan Bapak Heru Prasetyo selaku Kepala Puskesmas	<i>R</i>
8	26 September 2023	Wawancara dengan Ibu Budi Fatmawati Selaku Bendahara JKN	<i>Ch</i>
9	27 September 2023	Wawancara dengan Ibu Sriyatiningsih selaku Koordinator BPJS	<i>Ch</i>
10	27 September 2023	Wawancara dengan Bapak Heru Prasetyo selaku Kepala Puskesmas	<i>R</i>
11	27 September 2023	Wawancara dengan Ibu Budi Fatmawati Selaku Bendahara JKN	<i>L</i>
12	29 September 2023	Wawancara dengan Bapak Heru Prasetyo selaku Kepala Puskesmas	<i>R</i>
13	29 September 2023	Wawancara dengan Ibu Sriyatiningsih selaku Koordinator BPJS	<i>Ch</i>
14	29 September 2023	Wawancara dengan Ibu Budi Fatmawati Selaku Bendahara JKN	<i>L</i>
15	28 Oktober 2023	Wawancara dan Diberikan surat keterangan selesai penelitian	<i>R</i>

Kedungwungu, 28 Oktober 2023  
Kepala Puskesmas Kedungwungu

  
**HERU PRASETYO, SKM**  
 NIP. 19710141994031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-163 /Un.22/7.a/PP.00.9/09/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

12 September 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi  
Jl. Lektol Istiqlal No. 42, Singonegaran, Banyuwangi.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Yasinta Salsabela  
NIM : E20193086  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



4.





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS KEDUNGWUNGU**

Jl. Kalipait No: 37, Kedungwungu Kec. Tegaldlimo, Kode Pos 68484  
E-mail : [pkmkedungwungu@yahoo.com](mailto:pkmkedungwungu@yahoo.com)

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 445/2392/429.112.26/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heru Prasetyo  
Jabatan : Kepala Puskesmas

Dengan ini bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Yasinta Salsabela  
Nim : E20193086  
Semester : IX  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : FEBI/Akuntansi Syariah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi terhitung dari 19 September 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "ANALISIS PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI PUSKESMAS KEDUNGWUNGU KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kedungwungu, 28 Oktober 2023  
Kepala Puskesmas Kedungwungu



**HERU PRASSETYO, SKM**  
NIP. 19711014 199403 1 004

## PER KODE REKENING BELANJA TAHUN 2022

No	Rekening belanja	Alokasi Dana DPA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL	SISA ANGGARAN
1	Belanja bahan-bahan kimia	33.299.100,00								11.534.010,00				4.179.150,00	15.713.160,00	17.585.940,00
2	Belanja bahan - bakar dan pelumas	4.632.000,00				688.500,00		688.500,00		688.500,00			1.250.000,00		3.315.500,00	1.316.500,00
3	Belanja bahan - isi tabung gas	495.000,00											384.500,00		384.500,00	110.500,00
4	Belanja alat bahan – ATK	6.397.200,00				4.105.300,00									4.105.300,00	2.291.900,00
5	Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover	7.599.500,00					7.446.700,00								7.446.700,00	152.800,00
6	Belanja alat bahan - bahan cetak	14.054.600,00						11.081.200,00							11.081.200,00	2.973.400,00
7	Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor - benda pos	1.000.000,00					1.000.000,00								1.000.000,00	
8	Belanja alat bahan kegiatan kantor-bahan komputer	2.430.000,00				2.163.900,00									2.163.900,00	266.800,00
9	belanja obat-obatan – obat	38.863.200,00												31.745.830,00	31.745.830,00	7.117.370,00
10	belanja obat-obatan - obat lainnya	3.125.000,00												2.939.850,00	2.939.850,00	185.150,00
11	belanja jasa tenaga Kesehatan	244.584.600,00			31.130,460,00	36.183.780,00	18.122.400,00	17.433.900,00	17.976.600,00	18.033.300,00	18.216.900,00		38.490.500,00	18.338.400,00	211.926.240,00	32.622.360,00

1 2	belanja jasa pelayanan transaksi keuangan	38.400,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	8.700,00	2.900,00	2.900,00	31.900,00	2.900,00
1 3	belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan	18.000,000				1.972.450,00	496.450,00	496.450,00	496.450,00	496.450,00	496.450,00		992.900,00	496.450,00	5.944.050,00	12.055.950,00
1 4	belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang	2.260,000,00				565,000,00								565,000,00	1.130.000,00	1.130,000,00
1 5	belanja alat pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya	1.200,000,00											1.199.910,00		1.199.910,00	90,00
1 6	belanja pemeliharaan komputer-komputer unit- komputer paralel	5.150,000,00				855,000,00			705,000,00				3.510.000,00		5.070.000,00	80.000,00
1 7	belanja perjalanan dinas biasa	5.957,000,00				300,000,00				600,000,00	300,000,00			2.010.000,00	2.010.000,00	2.747,000,00
1 8	jumlah belanja barang & jasa	389.046.000,00	2.900,00	2.900,00	31.130,460,00	46.836.130,00	27.068.450,00	29.702.950,00	19.180.950,00	31,355.160,00	19,016.250,00	2,900,00	43,830.710,00	60,277.580,00	308,407.340,00	80.638.660,00
1 9	belanja modal personal computer	18.535.000,00														18.535.000,00
2 0	<b>JUMLAH</b>	<b>407.581.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>31.130,460,00</b>	<b>46.836.130,00</b>	<b>27.068.450,00</b>	<b>29.702.950,00</b>	<b>19.016.250,00</b>	<b>31,355.160,00</b>	<b>19,016.250,00</b>	<b>2,900,00</b>	<b>43,830.710,00</b>	<b>60,277.580,00</b>	<b>308,407.340,00</b>	<b>99.173.660,00</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DOKUMENTASI

### Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi



### Wawancara dengan Bapak Heru Prasetyo



### Wawancara dengan Ibu Budi Fatmawati



**Wawancara dengan Ibu Sriyatiningih**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


### SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Yasinta Salsabela  
NIM : E20193086  
Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 8 November 2023  
Koordinator Prodi. Akuntansi  
Syariah,



Dr. Nur Ika Mauliyah, SE.,M.Ak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-158.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/11/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : YASINTA SALSABELA  
NIM : E20193086  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : ANALISIS PENGELOLAAN DANA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI  
PUSKESMAS KEDUNGWUNGU KECAMATAN  
TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari naskah skripsi kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 7 November 2023

An. Dekan  
Kepala Bagian Akademik  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



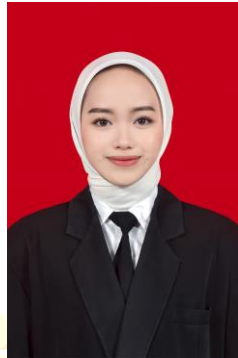
Syahrul Mulyadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Yasinta Salsabela  
Nim : E20193086  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 September 2001  
Alamat : Gempoldampit RT 48 RW 05  
Kedungwungu Kec. Tegadlimo kab.  
Banyuwangi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

No. Telepon : 081359378226

Email : [yasintasalsabela17@gmail.com](mailto:yasintasalsabela17@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Kedungwungu
2. SMPN 2 Tegadlimo
3. SMAN 1 Purwoharjo
4. UIN KHAS Jember